



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KOTA SOLOK



PUSAT STUDI KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ANDALAS



**LAPORAN ANTARA**  
**KAJIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI**  
**DI KOTA SOLOK**

**TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya hingga laporan antara **Kajian Indikator Pembangunan Ekonomi Di Kota Solok Tahun 2021** telah dapat diselesaikan dengan baik. Laporan menganalisis perkembangan indikator pembangunan ekonomi Kota Solok selama periode 2016-2020.

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan partisipasi aktif terutama dinas/instansi dan tim teknis yang telah membantu dalam proses pengumpulan data dan informasi indikator pembangunan ekonomi Kota Solok.

Akhirnya, kami berharap agar hasil analisis indikator pembangunan ekonomi Kota Solok ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya dalam merumuskan strategi dan kebijakan penguatan fondasi pembangunan ekonomi Kota Solok, kami juga berharap kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak bagi penyempurnaan laporan ini.

Laing, Mei 2021  
Kepala Balitbang  
Kota Solok

MARWIS, SE, MM  
NIP. 19631231 199003 1 244

**DAFTAR ISI**

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sasaran	3
1.5. Lokasi Kegiatan	4
1.6. Ruang Lingkup Kajian	4
1.7. Tahapan Pekerjaan	4
1.8. Keluaran Pekerjaan	5
<b>BAB 2 KERANGKA KONSEPTUAL</b>	<b>7</b>
2.1. Konsep dan Definisi Indikator Makro Ekonomi	7
2.2. Produk Domestik Regional Bruto	8
2.3. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Ekonomi	9
2.4. Inflasi	10
2.5. Pemerataan Pembangunan Ekonomi Daerah	12
2.6. Pengangguran dan Ketenagakerjaan	13
2.7. Kemiskinan	15
2.8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	16
2.9. Kemampuan Keuangan Daerah	18
2.10. Indeks Daya Saing Daerah	19
<b>BAB 3 METODOLOGI</b>	<b>22</b>
3.1. Pendekatan Pelaksanaan	22
3.2. Metode Pengumpulan Data	22
3.3. Pengolahan Data	23
3.4. Metode Analisa Data	23
3.5. Metode Proyeksi	23
<b>BAB 4 ANALISIS INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI KOTA SOLOK</b>	<b>28</b>
4.1. PDRB dan PDRB per Kapita	28
4.1.1. Perkembangan PDRB Kota Solok	28
4.1.2. Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Solok	32

4.1.3. Perbandingan PDRB per Kapita Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	34
4.2. Laju Pertumbuhan	36
4.3. Inflasi	42
4.3.1. Perkembangan Inflasi Kota Solok	42
4.3.2. Inflasi menurut Kelompok Barang Dan Jasa	43
4.4. Pengangguran dan Kesempatan Kerja	46
4.4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	46
4.5. Kondisi Kemiskinan di Kota Solok	50
4.5.1. Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan	50
4.5.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan	52
4.5.3. Indeks Keparahan Kemiskinan	54
4.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	55
4.6.1. Perkembangan IPM Kota Solok	55
4.6.2. Perbandingan IPM Kota Solok dengan Kabupaten/kota lain di Sumatera Barat	56
4.6.3. Indikator penyusun IPM	58
4.7. Pemerataan Pembangunan Ekonomi Daerah	64
4.8. Kemampuan Keuangan Daerah	66
4.8.1. Penerimaan Daerah	67
4.8.2. Pengeluaran Daerah	69
4.8.3. Kemampuan Keuangan Daerah	71
4.9. Tax Ratio	74
4.10. Indeks Daya Saing Daerah	76
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	<b>79</b>
5.1. Kesimpulan	79
5.2. Rekomendasi	80

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 2.1. Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM	17
Tabel 2.2. Kategori Nilai IPM	18
Tabel 2.3. Kategori Kemandirian Keuangan Daerah	18
Tabel 2.4. Derajat Desentralisasi Fiskal	19
Tabel 2.5. Rekapitulasi Komponen IDSD	20
Tabel 4.1. PDRB Kota Solok Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2016-2020	30
Tabel 4.2. Distribusi PDRB Kota Solok Menurut Lapangan Usaha (%), 2016-2020	31
Tabel 4.3. PDRB per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Juta Rupiah), 2016-2020	35
Tabel 4.4. Perbandingan Inflasi dan andil inflasi Provinsi Sumatera Barat, 2016-2020	45
Tabel 4.5. Garis kemiskinan Kota Solok, 2016-2020	50
Tabel 4.6. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat, 2016-2020	52
Tabel 4.7. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat, 2016-2020	53
Tabel 4.8. Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat, 2016-2020	54
Tabel 4.9. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat, 2016-2020	57
Tabel 4.10. Perkembangan Tax Ratio Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (%), 2016-2020	75
Tabel 4.11. Nilai dan Kategori IDSD Tahun 2019 dan 2020	77
Tabel 4.12. Nilai Aspek dan IDSD Kota Solok Tahun 2019-2020	77

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman	
Gambar 2.1.	Diagram Ketenagakerjaan	13
Gambar 4.1.	Perkembangan PDRB Kota Solok (Rp. Miliar), 2016-2020	29
Gambar 4.2.	Perkembangan PDRB per Kapita Kota Solok (Rp. Juta), 2016-2020	33
Gambar 4.3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Solok (%), 2016-2020	37
Gambar 4.4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Solok Menurut Lapangan Usaha (%), 2016-2020	39
Gambar 4.5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Solok Menurut Pengeluaran (%), 2016-2020	41
Gambar 4.6.	Perkembangan Inflasi Kota Solok, Provinsi Sumbar dan Nasional (% y-o-y), 2016-2020	42
Gambar 4.7.	Inflasi Tahunan Menurut Kelompok Barang dan Jasa TW-IV (%), 2020	45
Gambar 4.8.	Perkembangan TPAK Kota Solok Tahun 2016 – 2020	46
Gambar 4.9.	Perkembangan TPAK, TPT, dan % penduduk bekerja terhadap angkatan kerja	47
Gambar 4.10.	Perkembangan TPT berdasarkan lulusan tahun 2017 - 2020	48
Gambar 4.11.	Rata-rata Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan (%), 2017-2020	49
Gambar 4.12.	Perkembangan IPM Kota Solok, 2016 - 2020	55
Gambar 4.13.	Perbandingan IPM Kota Solok dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat, 2016 - 2020	56
Gambar 4.14.	Perkembangan AHH Kota Solok, 2016 - 2020	60
Gambar 4.15.	Perkembangan HLS dan RLS Kota Solok, 2016 - 2020	61
Gambar 4.16.	Perkembangan Pengeluaran Perkapita Kota Solok, 2016 - 2020	64
Gambar 4.17.	Perbandingan Gini Rasio Kota Solok dan Sumatera Barat, 2016 - 2020	65
Gambar 4.18.	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (Rp Juta) dan Rasionya Terhadap PDRB (%) Kota Solok, 2016-2020	68
Gambar 4.19.	Perkembangan Dana Perimbangan (Rp Juta) dan Rasionya Terhadap PDRB (%) Kota Solok, 2016-2020	68
Gambar 4.20.	Perkembangan Lain-lain Pendapatan yang Sah (Rp Juta) dan Rasionya Terhadap PDRB (%) Kota Solok, 2016-2020	68
Gambar 4.21.	Perkembangan Belanja Daerah (Rp Juta) dan Rasionya Terhadap PDRB (%) Kota Solok, 2016-2020	70
Gambar 4.22.	Rasio Belanja Langsung terhadap Belanja Tidak Langsung dan Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja (%), 2016-2020	70

Gambar 4.23.	Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian, dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Solok (%), 2016-2020	72
Gambar 4.24.	Perkembangan Pajak Daerah (Rp Juta) dan Rasionya Terhadap PDRB (%) Kota Solok, 2016-2020	74

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari pembangunan suatu daerah. Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan tersebut maka prosesnya mesti diawali dengan penyusunan perencanaan pembangunan yang baik, tepat, dan terukur sehingga melahirkan program/kegiatan yang efektif dan efisien. Perencanaan pembangunan yang baik, selain harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga mesti didukung oleh data-data yang relevan dan merefleksikan fakta yang sesungguhnya tentang kesejahteraan masyarakat. Data-data tersebut akan menjadi indikator dalam melakukan monitoring dan evaluasi proses pembangunan daerah. Data yang konsisten dan terintegrasi dalam perekonomian secara keseluruhan menjadi dasar bagi pemangku kepentingan (*stake holder*) untuk melahirkan kebijakan pembangunan periode berikutnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencanapembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam upaya menjaga keberlangsungan rancangan teknokratik RPJMD Kota Solok tahun 2021-2024 dimana salah satu sasaran pokoknya adalah meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa, sangat penting untuk mengetahui kondisi terkini mengenai perkembangan ekonomi wilayah secara menyeluruh untuk kemudian dapat memperkirakan kondisi perekonomian di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk

dilakukan kajian indikator pembangunan ekonomi yang memberikan gambaran kondisi pembangunan ekonomi di Kota Solok, sehingga berbagai kebijakan dapat disusun dan diturunkan dalam bentuk program dan kegiatan yang relevan dan tepat.

## **1.2. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai Pengganti Permendagri Nomor 5 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari dilaksanakannya kajian Indikator Pembangunan Ekonomi di Kota Solok adalah untuk menyediakan data dan informasi dasar yang dapat mempresentasikan kondisi eksisting pembangunan ekonomi Kota Solok yang terukur berdasarkan indikator-indikator pembangunan ekonomi.

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan kajian ini adalah memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan kebijakan di bidang pembangunan ekonomi Kota Solok.

### **1.4. Sasaran**

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kajian ini adalah sebagaiberikut:

1. Teridentifikasinya indikator-indikator pembangunan ekonomi di Kota Solok.
2. Terkumpul dan terdokumentasikannya seluruh data dan informasi yang diperlukan guna memenuhi indikator-indikator pembangunan ekonomi di Kota Solok.
3. Terpresentasikannya makna indikator-indikator pembangunan ekonomi di Kota Solok.
4. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Solok yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi untuk penguatan perekonomian masyarakat.

### **1.5. Lokasi Kegiatan**

Lokasi kegiatan ini meliputi wilayah administratif Kota Solok yang terdiri dari 2 (dua) Kecamatan dan 13 (tiga belas) Kelurahan.

### **1.6. Ruang Lingkup Kajian**

Kajian ini melingkupi seluruh wilayah Kota Solok dengan cakupan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Solok dan seluruh wilayah Kota Solok.

### **1.7. Tahapan Pekerjaan**

Kajian ini melalui beberapa tahapan kegiatan yang terdiri dari:

- a. Melakukan persiapan manajemen dan administrasi pengkajian.
- b. Menyusun kebutuhan data/ informasi terkait.
- c. Melakukan pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder.
- d. Menganalisis dan membahas data dan informasi.
- e. Penyusunan laporan pendahuluan.
- f. Pembahasan Laporan pendahuluan oleh tim ahli dan tim teknis kajian.

- g. Finalisasi Laporan Pendahuluan.
- h. Pengumpulan data pendukung, baik data primer maupun data sekunder.
- i. Penyusunan laporan antara.
- j. Pembahasan laporan antara oleh tim ahli dan tim teknis pengkajian
- k. Finalisasi laporan antara.
- l. Penyusunan laporan akhir.
- m. Pembahasan laporan akhir oleh tim ahli dan tim teknis pengkajian.
- n. Finalisasi laporan akhir.
- o. Menyusun ringkasan eksekutif.
- p. Seminar hasil kajian.
- q. Cetak dokumen publikasi.

### **1.8. Keluaran Pekerjaan**

Keluaran (output) dari pekerjaan ini berupa 1 (satu) dokumen tentang:

- a. Analisis perkembangan indikator ekonomi Kota Solok tahun 2016-2020 yang meliputi :
  - 1) PDRB dan PDRB per kapita;
  - 2) Laju Pertumbuhan Ekonomi;
  - 3) Laju Inflasi;
  - 4) Pemerataan Pembangunan Ekonomi Daerah;
  - 5) Tingkat Pengangguran;
  - 6) Tingkat Kemiskinan;
  - 7) Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
  - 8) Kemampuan Keuangan Daerah;
  - 9) Tax ratio

- 10) Indeks Daya Saing Daerah
- b. Analisis proyeksi pembangunan ekonomi yang dibutuhkan di Kota Solok yang nantinya dapat direkomendasikan menjadi referensi bagi Walikota Solok dan pengambilan kebijakan lainnya di Kota Solok khususnya terkait kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

---

## BAB 2

### KERANGKA KONSEPTUAL

#### 2.1. Konsep dan Definisi Indikator Makro Ekonomi

Indikator pembangunan ekonomi adalah pengukuran statistik yang digunakan untuk melihat perkembangan ekonomi saat ini dan saat yang akan datang. Statistik tersebut diterbitkan secara periodik (bisa harian, bulanan, maupuntahunan) oleh pemerintah, lembaga-lembaga atau pun organisasi- organisasi swasta. Indikator pembangunan ekonomi tersebut dipublikasikan berdasarkan atas pengamatan terhadap industri-industri, wilayah/daerah, ataupun negara. Fungsi utama indikator pembangunan ekonomi adalah untuk menganalisis perkembangan ekonomi saat ini, memprediksi perkembangan ekonomi di masa yang akan datang, dan membuat perbandingan kinerja perekonomian suatu daerah dalam konteks antar waktu maupun antar daerah. Fungsi lain dari indikator pembangunan ekonomi adalah untuk mengatur atau mengubah ekspektasi pasar. Oleh sebab itu, indikator pembangunan ekonomi dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pasar barang dan jasa, pasar tenaga kerja, pasar valuta asing, pasar saham, dan pasar bursa berjangka.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) memperkenalkan konsep pengukuran kinerja pembangunan melalui tiga pilar pembangunan ekonomi inklusif yaitu: (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, (2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan, dan (3) perluasan akses dan kesempatan. Keberhasilan pencapaian masing-masing pilar pembangunan ekonomi tersebut diukur melalui beberapa indikator. Indikator untuk melihat kinerja pertumbuhan dan perkembangan ekonomi antara lain adalah pertumbuhan PDRB riil per kapita, kontribusi manufaktur terhadap PDRB, kesempatan kerja dan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN. Indikator untuk melihat kinerja pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan antara lain adalah indeks Gini, rasio rata-rata pengeluaran rumah tangga desa dan kota, dan persentase penduduk miskin. Kemudian, indikator untuk melihat

perluasan akses dan kesempatan antara lain adalah Indeks Harapan Lama Sekolah, persentase penduduk yang memiliki jaminan Kesehatan, dan persentase rumah tangga dengan sumber air minum layak.

Kementerian Dalam Negeri melalui Permendagri No. 86 Tahun 2017 juga mengemukakan sejumlah indikator kinerja penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan. Jumlah indikatornya lebih banyak dari konsep yang dikemukakan oleh Bappenas. Semua indikator dibagi atas tiga kelompok yaitu : (1) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, (2) Aspek Daya Saing, dan (3) Aspek Pelayanan Umum. Ada beberapa dari indikator tersebut sama dengan apa yang dikemukakan oleh Bappenas.

Secara lebih spesifik, dalam rangka mencapai tujuan penyusunan dokumen ini, maka terdapat indikator-indikator pembangunan ekonomi yang perlu untuk diamati. Indikator-indikator dimaksud adalah PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, pemerataan pembangunan ekonomi daerah, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemampuan Keuangan Daerah, dan Rasio Pajak (*tax ratio*). Analisis dan kajian dari masing-masing indikator tersebut diharapkan menjadi masukan dalam membuat perencanaan dan kebijakan pembangunan di masa mendatang.

## **2.2. Produk Domestik Regional Bruto**

Secara umum Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas ekonomi tersebut dimiliki oleh penduduk negara tersebut atau penduduk negara lain. Data PDRB ini disajikan atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku dalam satuan mata uang negara terkait. PDRB atas dasar harga berlaku adalah PDRB yang dihitung berdasarkan volume produksi dan harga pada saat dilakukan perhitungan. PDRB harga konstan adalah PDRB yang dihitung berdasarkan volume

produksi pada tahun tersebut tetapi harga yang digunakan adalah harga tahun tertentu sebagai tahun dasar sehingga pengaruh inflasi bisa diminimalisir.

Perhitungan PDRB secara konseptual menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Pendekatan produksi dilakukan dengan cara membagi aktivitas perekonomian menjadi beberapa kategori lapangan usaha dan nilai tambah yang terjadi di setiap lapangan usaha disagregasi sehingga membentuk PDRB menurut lapangan usaha. Pendekatan pengeluaran dilakukan dengan cara menjumlahkan semua permintaan barang dan jasa dari setiap sektor pelaku ekonomi yaitu sektor rumah tangga, sektor dunia usaha, sektor pemerintah, dan sektor luar negeri. Selanjutnya, pendekatan pendapatan yang dihitung dengan cara menjumlahkan semua balas jasa dari setiap faktor produksi pendapatan upah, sewa modal dan pendapatan dari usaha (keuntungan). Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) biasanya hanya menerbitkan data PDRB dengan pendekatan pertama dan kedua.

PDRB juga dapat disajikan dalam bentuk PDRB per kapita yang diperoleh dengan cara membaginya dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita menunjukkan besarnya pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata selama satu tahun. PDRB per kapita juga bisa disajikan dalam bentuk harga berlaku maupun harga konstan.

### **2.3. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Ekonomi**

Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) merupakan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam proses pembangunan suatu daerah pada suatu periode tertentu. LPE ini dihitung berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan. LPE ini bisa dilihat secara keseluruhan dari PDRB, bisa juga dilihat per sektor PDRB. Rumusnya adalah sebagai berikut :

$$r_t = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}}$$

Dimana :

$r_t$  = laju pertumbuhan tahun t (%)

$Y_{t-1}$  = PDRB tahun t-1

$Y_t$  = pdrb tahun t

Kontribusi sektor perekonomian adalah persentase (proporsi) masing-masing sektor terhadap total PDRB. Peran/kontribusi masing-masing sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah memperlihatkan struktur perekonomian suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian daerah tersebut. Formula untuk mendapat besaran kontribusi masing-masing sektor lapangan usaha adalah sebagai berikut.

$$Kontribusi_i = \frac{PDRB_i}{PDRB_{total}} \times 100\%$$

Dimana :

$Kontribusi_t$  = laju pertumbuhan tahun t (%)

$PDRB_t$  = PDRB tahun t

$PDRB_{total}$  = Total PDRB

## 2.4. Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Untuk mengukur perubahan harga dari dua periode waktu yang berbeda digunakan angka indeks harga. Angka indeks harga adalah angka yang menunjukkan perbandingan harga dalam dua waktu yang berbeda, sehingga angka indeks harga didefinisikan sebagai angka perbandingan antara harga komoditi atau kelompok komoditi yang terjadi pada suatu periode

waktu dengan periode waktu yang telah ditentukan.

Penghitungan inflasi di Indonesia menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK). Sejak Januari 2014, IHK dihitung berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) di 82 kota yang mencakup sekitar 225 – 462 komoditas. Metode yang digunakan dalam penghitungan IHK adalah formula Laspeyres yang telah dimodifikasi, yaitu

$$I_n = \frac{\sum_{P_{n-1}}^{P_n} P_{n-1} \cdot Q_0}{\sum P_0 Q_0} \times 100\%$$

dimana:

$I_n$  = Indeks bulanan

$P_n$  = Harga pada bulan ke-n

$P_{n-1}$  = harga pada bulan ke-(n-1)

$P_0$  = Harga pada tahun dasar

$Q_0$  = Kuantitas pada tahun dasar

Untuk menghitung inflasi digunakan rumus berikut :

$$Inflasi_n = \frac{I_n - I_{n-1}}{I_{n-1}} \times 100\%$$

$$\text{Inflasin} = (I_n - I_{n-1}) / I_{n-1} \times 100$$

dimana:

$Inflasi_n$  = Inflasi bulan n

$I_n$  = IHK bulan n

$I_{n-1}$  = IHK bulan n-1

Data inflasi dipublikasikan oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Tidak semua kabupaten/kota di Indonesia melakukan penghitungan inflasi secara tersendiri. Untuk Provinsi Sumatera Barat ada dua wilayah yang diamati pergerakan harga komoditinya yaitu Kota Padang dan Bukittinggi. Angka inflasi yang dipublikasikan merupakan representasi dari inflasi Sumatera Barat. Masing masing kabupaten / kota mengacu kepada angka inflasi tingkat provinsi.

## 2.5. Pemerataan Pembangunan Ekonomi Daerah

Pemerataan pembangunan secara umum dapat diartikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan secara merata dan adil pada setiap daerah dan dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang tidak merata antar daerah dan antar lapisan masyarakat disebut juga dengan istilah ketimpangan pembangunan. Implikasi dari ketimpangan pembangunan adalah terjadinya ketimpangan pendapatan.

Menurut Wie (1981) ada 3 kategori ketimpangan pendapatan yaitu ketimpangan pendapatan antar golongan penerima pendapatan (*size distribution income*), ketimpangan pembagian pendapatan antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan (*urban-rural income disparities*) dan ketimpangan pembagian pendapatan antar daerah (*regional income disparities*). Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan adalah Indeks Gini dan Indeks Williamson. Indeks Gini mengukur ketimpangan pendapatan antar golongan pendapatan sedangkan Indeks Williamson mengukur ketimpangan pendapatan antar wilayah (daerah).

Pengukuran tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan Indeks Gini. Istilah lain dari Indeks Gini adalah Rasio Gini Pendapatan. Namun demikian, mengingat sulitnya mendapatkan data pendapatan maka data pengeluaran yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) digunakan sebagai proksi pendapatan.

Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 dan 1. Bila koefisien Gini bernilai 0 maka maknanya adalah terjadinya pemerataan yang sempurna yakni setiap orang memiliki pendapatan dalam jumlah yang sama. Sebaliknya bila koefisien Gini bernilai 1 maka ini bermakna semua pendapatan hanya dimiliki oleh satu individu sedangkan sisanya tidak memiliki apa-apa. Dalam realita tidak pernah terjadi koefisien Gini bernilai 0 atau 1 melainkan diantaranya. Adapun kriteria penilaian rasio Gini yang sering digunakan sebagai berikut:

- a. Rasio Gini  $< 0,4$ , artinya tingkat ketimpangan rendah

- b.  $0,4 < \text{Rasio Gini} < 0,5$ , artinya tingkat ketimpangan moderat
- c. Rasio Gini  $> 0,5$ , artinya tingkat ketimpangan tinggi

## 2.6. Pengangguran dan Ketenagakerjaan

Data angkatan kerja yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan *the labour force concept* yang direkomendasikan oleh *International Labour Organization* (ILO). Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok yaitu penduduk yang termasuk ke dalam usia kerja dan bukan usia kerja. Adapun untuk lebih jelasnya kita lihat diagram ketenagakerjaan dibawah ini :

Gambar 2.1.  
Diagram Ketenagakerjaan



Sumber : BPS Indonesia

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

(TPAK) merupakan indikator yang dapat mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah.

TPAK dihitung dengan membandingkan data angkatan kerja dengan data penduduk usia kerja. Semakin tinggi nilai TPAK menunjukkan proporsi angkatan kerja yang semakin membesar pada struktur demografi suatu wilayah. Dengan melihat TPAK dapat ditunjukkan perbandingan persentase penduduk yang telah dan siap untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Namun demikian, tingginya TPAK tidak selalu berarti membaiknya kinerja ketenagakerjaan. Apabila tingginya TPAK diikuti oleh peningkatan dalam proporsi penduduk bekerja, maka TPAK tersebut menunjukkan kinerja partisipasi angkatan kerja yang baik. Sebaliknya, bila tingginya TPAK diikuti oleh peningkatan penduduk pencari kerja, maka dikhawatirkan akan memicu tingginya angka pengangguran.

$$TPAK = \frac{\text{Jumlah angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja}} \times 100$$

Konsep pengangguran (*jobless*) yang digunakan oleh BPS adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau *open unemployment rate* merupakan indikator ketenagakerjaan untuk melihat persentase proporsi penduduk yang tidak bekerja (*jobless*) dalam angkatan kerja. Angka ini diinterpretasikan sebagai jumlah pengangguran (tidak bekerja atau sedang mencari kerja) dari 100 orang yang masuk dalam kategori angkatan kerja.

$$TPT = \frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100$$

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah peluang seseorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Tingkat kesempatan kerja menggambarkan kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja

$$TKK = \frac{\text{Jumlah penduduk bekerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100$$

$$= 100\% - TPT$$

## 2.7. Kemiskinan

Konsep kemiskinan yang digunakan di Indonesia menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Besaran nilai kebutuhan dasar minimum tersebut ditentukan dengan menggunakan Garis Kemiskinan (GK), yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi makanan dan bukan makanan. Adapun besaran GK yang selama ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terdiri dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKNM).

Untuk mendapatkan GK di tingkat provinsi, BPS terlebih dahulu menentukan kelompok acuan sebanyak 20 persen dari penduduk dengan nilai konsumsi yang berada di atas garis kemiskinan sementara (GKS). GKS adalah GK pada periode sebelumnya yang telah dikalikan dengan faktor inflasi. Dari kelompok acuan tersebut kemudian dilakukan penghitungan nilai konsumsi terhadap 52 komoditas makanan yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung rata-rata kalori dari ke-52 komoditas tersebut. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh GKM. Selanjutnya GKM tersebut disetarakan dengan 2.100 kilo kalori dengan mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah dari penduduk referensi.

Adapun GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/subkelompok nonmakanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/subkelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/subkelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Selanjutnya,

penjumlahan dari GKM dan GKNM menghasilkan GK. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Pengukuran angka kemiskinan dibagi dalam tiga bentuk yaitu :

- a. **Head Count Index (HCI-P0)** adalah persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK)
- b. **Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1)** merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- c. **Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2)** memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin

## 2.8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM mengukur pencapaian pembangunan manusia dalam tiga dimensi yaitu dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan dan dimensi ekonomi. Dimensi kesehatan diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH), dimensi pengetahuan diukur dengan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan dimensi ekonomi diukur dengan jumlah pengeluaran. Metode terbaru penghitungan IPM adalah dengan menggunakan formula sebagai berikut :

*Indeks Kesehatan*

$$I_{Kesehatan} = \frac{AHH_0 - AHH_{0min}}{AHH_{0maks} - AHH_{0min}}$$

## Indeks Pendidikan

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

## Indeks Pengeluaran

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{maks}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}$$

Untuk menghitung indeks masing-masing IPM digunakan batas maksimum dan minimum sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 2.1.  
Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM

Komponen	Satuan	Min	Max
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHHo)	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Rupiah	1.007.436	26.572.352

Adapun langkah berikutnya adalah melakukan agregasi terhadap masing-masing komponen IPM untuk membentuk dan mendapatkan nilai angka IPM, dengan formula sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

Nilai IPM berkisar antara 0 sampai 100. Semakin besar nilai IPM menunjukkan kualitas pembangunan manusia yang semakin baik. Nilai IPM dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori: rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nilai IPM untuk masing-masing kategori tersebut disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2.  
Kategori Nilai IPM

No.	Nilai IPM	Kelompok
1.	IPM < 60	Rendah
2.	60 ≤ IPM ≤ 70	Sedang
3.	70 ≤ IPM ≤ 80	Tinggi
4.	IPM > 80	sangat tinggi

Sumber: BPS, 2015

## 2.9. Kemampuan Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan daerah dapat diukur melalui beberapa rasio keuangan daerah (Halim, 2001) yaitu :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Rasio ini menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat. Rasio ini merupakan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan}}$$

Penilaian terhadap Kemandirian Keuangan Daerah tersebut dapat merujuk kepada tabel kriteria berikut :

Tabel 2.3.  
Kategori Kemandirian Keuangan Daerah

Persentase PAD terhadap Dana Perimbangan	Kategori Kemandirian Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber : Halim, 2001

2. Rasio Desentralisasi Fiskal. Rasio ini menunjukkan derajat kewenanga dan tanggung jawab yang dipikulkan oleh pemerintah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Rasio ini di rumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

Penilaian terhadap rasio Desentralisasi Fiskal atau disebut juga dengan istilah Derajat Desentralisasi Fiskal dapat berpedoman pada Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4.  
Derajat Desentralisasi Fiskal

Persentase PAD terhadap Total Penerimaan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50	Sangat Baik

Sumber : Halim, 2001

## 2.10. Indeks Daya Saing Daerah

Pengembangan wilayah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan suatu pembangunan yang berkelanjutan. Tingkat daya saing (competitiveness) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi.

Untuk mengukur tingkat daya saing daerah Kemenristek/BRIN melalui Direktorat Sistem Inovasi, Deputi Bidang Penguatan Inovasi telah menginisiasi penyusunan model pengukuran indeks daya saing daerah (IDSD) yang diharapkan dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui

peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah menggunakan 4 aspek utama yaitu lingkungan penguat, sumberdaya manusia, pasar dan ekosistem inovasi; 12 pilar yaitu Kelembagaan, Infrastruktur, Perekonomian Daerah, Kesehatan, Pendidikan, Efisiensi Pasar Produk, Ketenagakerjaan, Akses Keuangan, Ukuran Pasar, Adopsi Teknologi, Dinamika Bisnis, Kapasitas Inovasi dengan 23 Dimensi dan 78 indikator (kuisisioner).

Tabel 2.5. Rekapitulasi Komponen IDSD

NO	ASPEK/FAKTOR	PILAR	DIMENSI	INDIKATOR
I	Aspek Faktor Penguat/Enabling Environment	Pilar Kelembagaan	Tata Kelola Pemerintahan	4
			Keamanan dan Ketertiban	1
		Pilar Infrastruktur	Infrastruktur Transportasi	2
			Infrastruktur Air Bersih dan Kelistrikan	2
		Pilar Perekonomian Daerah	Keuangan Daerah	5
			Stabilitas Ekonomi	4
II	Aspek Sumber Daya Manusia/Human Capital	Pilar Kesehatan	Kesehatan	1
		Pilar Pendidikan dan Keterampilan	Pendidikan	6
			Keterampilan	3
		Pilar Efisiensi Pasar Produk	Kompetisi Dalam Negeri	2
			Pajak dan Retribusi	3
			Stabilitas Pasar	1
III	Aspek Pasar/Market	Pilar Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	2
			Kapasitas tenaga kerja	3
		Pilar Akses Keuangan	Akses Keuangan	6
		Pilar Ukuran Pasar	Ukuran Pasar	3
		Pilar Dinamika Bisnis	Regulasi	4
			Kewirausahaan	5
IV	Aspek Ekosistem Inovasi	Pilar Kapasitas Inovasi	Interaksi dan Keberagaman	6
			Penelitian dan Pengembangan (R & D)	9
		Pilar Kesiapan Teknologi	Komersialisasi	3
			Telematika	2
			Teknologi	1

Sumber: BRIN 2020

IDSD ini merupakan refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah, dan berperan penting sebagai alat untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing dengan daerah lain dan mendukung daya saing nasional. Pengukuran IDSD

diharapkan menjadi salah satu dasar utama penyusunan dan penetapan kebijakan nasional maupun daerah yang mendorong sinergi program antar sektor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan daerah yang inovatif.

Selanjutnya, metode perhitungan indeks Daya Saing Daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Dimensi merupakan rata-rata dari Indikator, dihitung dengan persamaan:

$$Dimensi = \frac{\sum_i^n Indikator\ i}{n}$$

2. Pilar merupakan rata-rata dari Dimensi

$$Pilar = \frac{\sum_i^n Dimensi\ i}{n}$$

3. Aspek merupakan rata-rata dari Pilar

$$Aspek = \frac{\sum_i^n Pilar\ i}{n}$$

4. Indeks merupakan rata-rata dari Aspek:

$$Indeks = \frac{\sum_i^n Aspek\ i}{n}$$

---

## BAB 3 METODOLOGI

### 3.1. Pendekatan Pelaksanaan

Pekerjaan penyusunan analisa indikator pembangunan ekonomi Kota Solok menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif merupakan data sekunder dan primer yang yang diperoleh dari dinas-dinas terkait dan studi lapangan. Sementara data kualitatif diperoleh dari diskusi dengan tim teknis Kota Solok. Langkah berikutnya menganalisis data kualitatif dan kuantitatif yang diinterpretasikan. Penggabungan kedua analisis ini, akan lebih memperluas wawasan permasalahan dan kondisi objektif makro ekonomi Kota Solok dalam beberapa tahun terakhir. Adapun rincian metode pendekatan sebagai berikut :

- a. *Desk study* berupa kajian terhadap data-data sekunder yang dipublikasikan oleh lembaga terkait dan kemudian didiskusikan dengan tim teknis.
- b. Mengumpulkan berbagai informasi kualitatif dan kuantitatif, baik lisan maupunsecara tertulis (terdokumentasikan) untuk melengkapi data sekunder yang sudah ada.
- c. Mencermati kebijakan makro ekonomi pemerintah pusat dan arah & strategi pembangunan ekonomi Kota Solok.
- a. Mencermati kondisi indikator pembangunan ekonomi saat ini dan prospeknyapada masa yang akan datang.;

Data yang diperlukan dalam penyusunan kajian indikator pembangunan ekonomi Kota Solok ini bersifat dokumentatif (data sekunder) yang diperoleh dari berbagai instansi terkait yakni BPS, Bank Indonesia, Bappeda dan SKPD terkait serta situs *internet*.

### 3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk memperoleh data adalah penelaahan dan penelusuran data yang telah terdokumentasikan oleh lembaga terkait. Beberapa data dapat juga diperoleh

melalui situs internet. Selain itu, data dan informasi dikumpulkan pula dengan berdiskusi dengan tim teknis pemerintah Kota Solok.

### **3.3. Pengolahan Data**

Data yang telah terkumpul diolah mengikuti tinjauan konsep-konsep dan formula perhitungan ekonomi dan statistik. Untuk mempermudah dan mempercepat serta mencapai keakuratan perhitungan maka digunakan bantuan *software* statistik dan *excel*.

### **3.4. Metode Analisa Data**

Setelah data terkumpulkan maka dilakukan sortir data. Sortir data adalah kegiatan untuk memilah-milah data yang relevan dan data yang kurang relevan bahkan mungkin tidak bermanfaat dalam penyusunan buku analisis indikator pembangunan ekonomi Kota Solok namun terikut dalam proses pengumpulan data sekunder. Selanjutnya, hasil analisis data akan disajikan dalam bentuk tabel maupun gambar serta bentuk grafis untuk memberikan gambaran yang lebih mudah dipahami.

### **3.5. Metode Proyeksi**

Semenjak Sarle (1925) memelopori ekonometrika *forecasting*, ilmu dan teknik ekonometrika *forecasting* mengalami perkembangan yang dahsyat. Berbagai teknik ekonometrika *forecasting* modern diimplimentasikan oleh para forecaster terutama pada bidang ekonomi. Walaupun berbagai teknik ekonometrika *forecasting* tersedia, dalam prinsip dasar yang dipegang oleh para forecaster adalah menggunakan model yang sederhana, menggunakan sebanyak mungkin data yang tersedia, dan menggunakan teori sebagai petunjuk untuk memilih variabel kasualitas (allen, 2001). Berpegang pada prinsip ini maka metode proyeksi yang digunakan dalam menghitung besaran indikator pembangunan ekonomi Kota Solok adalah *exponential smoothing*. Metode *exponential smoothing* adalah metode sederhana dari *forecasting*

adaptif. Metode ini efektif digunakan ketika jumlah observasi yang sedikit yang menjadi dasar memproyeksi dengan nilai *mean square error* (MSE) dan *mean absolute percentage error* (MAPE) yang kecil (Koehler, et al., 2002). Kriteria ini pula yang menjadi dasar tidak menggunakan metode forecasting lain yang lazim digunakan dalam memproyeksi indikator ekonomi, seperti *autoregressive* (AR), *moving average* (MA), atau *autoregressive moving average* (ARMA), atau *autoregressive integrated moving average* (ARIMA). Selain itu, metode *exponential smoothing* sangat populer digunakan pada bidang bisnis dan industri (Hyndman et. al., 2008)

Ada berbagai metode *exponential smoothing* yang tersedia (Koehler, et al., 2002) dan dapat dipakai untuk memproyeksi, diantaranya:

#### 1. *Single Smoothing (One Parameter)*

Metode ini tepat digunakan untuk runtun waktu yang bergerak secara random diatas atau dibawah rata-rata konstanta dengan tanpa tren atau pola musiman. *Smoothed series*  $\hat{y}_t$  dari  $y_t$  dihitung secara rekursif dengan mengevaluasi:

$$\hat{y}_t = \alpha y_t + (1 - \alpha)\hat{y}_{t-1}$$

dimana  $0 < \alpha \leq 1$  adalah faktor *damping* (atau *smoothing*).  $\alpha$  terkecil adalah *smoother*  $\hat{y}_t$ .

Dengan substitusi secara berulang, persamaan diatas dapat ditulis secara rekursif:

$$\hat{y}_t = \alpha \sum_{s=0}^{t-1} (1 - \alpha)^s y_{t-s}$$

Persamaan inilah yang disebut *exponential smoothing*.

Proyeksi dari *single smoothing* adalah konstan untuk semua observasi dimasa datang yang ditunjukkan oleh persamaan berikut:

$$\hat{y}_{T+k} = \hat{y}_T \text{ untuk semua } k > 0$$

dimana  $T$  adalah akhir dari sampel estimasi.

## 2. Double Smoothing (One Parameter)

Metode ini mengaplikasikan metode single smoothing dua kali menggunakan parameter yang sama dan sangat cocok digunakan untuk runtun waktu dengan tren linear. *Double smoothing* didefinisikan dengan rekursi berikut:

$$S_t = \alpha y_t + (1 - \alpha)S_{t-1}$$

$$D_t = \alpha S_t + (1 - \alpha)D_{t-1}$$

dimana  $S$  adalah *single smoothed series* dan  $D$  adalah *double smoothed series*. Double smoothing adalah *single parameter smoothing* dengan  $0 < \alpha \leq 1$  adalah faktor *damping* (atau *smoothing*).

Proyeksi menggunakan *double smoothing* dihitung dengan

$$\hat{y}_{T+k} = \left(2 + \frac{\alpha k}{1 - \alpha}\right) S_T - \left(1 + \frac{\alpha k}{1 - \alpha}\right) D_T$$

$$\hat{y}_{T+k} = \left(2S_T - D_T + \frac{\alpha}{1 - \alpha}(S_T - D_T)k\right)$$

Ekspresi terakhir menunjukkan proyeksi dari *double smoothing* yang berada pada tren linear dengan intersep  $2S_T - D_T$  dan slop  $\alpha(S_T - D_T)/(1 - \alpha)$ .

## 3. Holt-Winters-No Seasonal (Two Parameter)

Metode ini tepat digunakan untuk runtun waktu dengan tren waktu linear dan tidak ada variasi musiman. *Smoothed series*  $\hat{y}_t$  adalah

$$\hat{y}_{t+k} = a + bk$$

dimana

$a$  komponen permanen (intersep)

$b$  tren

Kedua koefisien ini didefinisikan mengikuti rekursi berikut:

$$a(t) = \alpha y_t + (1 - \alpha)(a(t-1) + b(t-1))$$

$$b(t) = \beta(a(t) - a(t - 1)) + 1 - \beta b(t - 1)$$

dimana  $0 < \alpha, \beta, \gamma < 1$  adalah faktor damping.

Proyeksi dihitung menggunakan

$$\hat{y}_{t+k} = a(T) + b(T)k$$

Proyeksi ini berada pada tren linear dengan intersep  $a(T)$  dan slop  $b(T)$ .

#### 4. Holt-Winters-Multiplicative (Three Parameter)

Metode ini cocok untuk runtun waktu dengan tren waktu linear dan variasi musiman yang multiplikatif. *Smoothed series*  $\hat{y}_t$  adalah

$$\hat{y}_{t+k} = (a + bk)c_{t+k}$$

dimana

$a$  komponen permanen (intersep)

$b$  tren

$c_t$  faktor musiman multiplikatif

Ketiga koefisien ini didefinisikan dengan rekursi berikut:

$$a(t) = \alpha \frac{y_t}{c_t(t-s)} + (1 - \alpha)(a(t-1) + b(t-1))$$

$$b(t) = \beta(a(t) - a(t-1)) + (1 - \beta)b(t-1)$$

$$c_t(t) = \gamma \frac{y_t}{a(t)} + (1 - \gamma)c_t(t-s)$$

dimana  $0 < \alpha, \beta, \gamma < 1$  adalah faktor damping dan  $s$  adalah frekuensi musiman pada siklus musiman (*cycle for seasonal*).

Proyeksi dihitung menggunakan

$$\hat{y}_{t+k} = (a(T) + b(T)k)c_{T+k-s}$$

dimana faktor musiman digunakan dari estimasi  $s$ .

### 5. Holt-Winters-Additive (Three Parameter)

Metode ini tepat digunakan untuk runtun waktu dengan tren waktu linear dan variasi musiman aditif. *Smoothed series*  $\hat{y}_t$  adalah

$$\hat{y}_{t+k} = a + bk + c_{t+k}$$

dimana  $a$  dan  $b$  adalah komponen permanen dan tren sebagaimana didefinisikan sebelumnya dan  $c$  adalah faktor musiman aditif.

Ketiga koefisien ini didefinisikan mengikuti rekursi berikut:

$$a(t) = \alpha(y_t - c_t(t-s)) + (1-\alpha)(a(t-1) + b(t-1))$$

$$b(t) = \beta(a(t) - a(t-1)) + 1 - \beta b(t-1)$$

$$c_t(t) = \gamma(y_t - a(t+1)) - \gamma c_t(t-s)$$

dimana  $0 < \alpha, \beta, \gamma < 1$  adalah faktor damping dan  $s$  adalah frekuensi musiman pada siklus musiman (*cycle for seasonal*).

Proyeksi dihitung menggunakan

$$\hat{y}_{t+k} = a(T) + b(T)k + c_{T+k-s}$$

dimana faktor musiman digunakan dari estimasi  $s$ .

Walaupun terdapat berbagai pilihan metode *exponential smoothing* untuk memprediksi indikator pembangunan ekonomi Kota Solok, proyeksi hanya dilakukan pada metode *exponential smoothing* yang memiliki nilai *mean square error* (MSE) dan *mean absolute percentage error* (MAPE) paling kecil.

---

## BAB 4

### ANALISIS INDIKATOR PEMBANGUNAN EKONOMI KOTA SOLOK

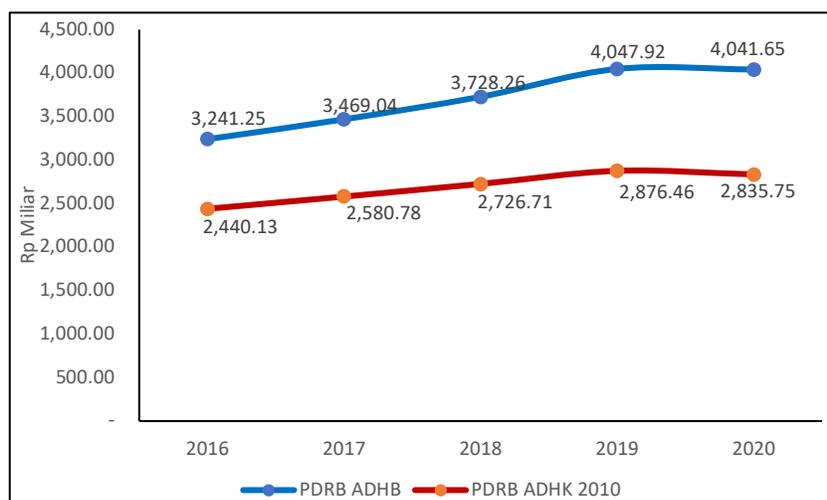
#### 4.1. PDRB dan PDRB per Kapita

Salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja pembangunan ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan penjumlahan nilai tambah bruto (barang dan jasa) yang dihasilkan oleh semua kegiatan ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu (biasanya dihitung satu tahun) tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen dan non residen. Dalam menganalisis PDRB Kota Solok maka fokus pembahasan tertuju pada beberapa aspek: (1) perkembangannya dari waktu ke waktu, baik besaran nilai agregat nominal dan riil dalam satuan rupiah maupun per kapita, (2) pertumbuhannya dalam persentase per tahun, dan (3) struktur yang membentuk PDRB. Aspek-aspek PDRB ini menggambarkan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan oleh Kota Solok. Semakin besar nilai PDRB Kota Solok menunjukkan semakin besar sumberdaya ekonomi yang dimiliki Kota Solok, begitu juga sebaliknya.

##### 4.1.1. Perkembangan PDRB Kota Solok

Indikator pembangunan ekonomi utama yang selalu menjadi acuan kinerja pembangunan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan ukuran ekonomi (*economic size*) sebuah daerah. Besaran PDRB mencerminkan besaran output dari aktivitas ekonomi yang berada pada suatu daerah baik sisi produksi maupun sisi pengguna akhir. Oleh karena itu, untuk melihat perkembangan aktivitas ekonomi yang menghasilkan output atau besaran ekonomi sebuah daerah maka perlu menganalisis perkembangan PDRB. Semakin besar PDRB maka semakin besar pula kemampuan ekonomi suatu daerah.

Gambar 4.1.  
Perkembangan PDRB Kota Solok (Rp. Miliar), 2016-2020



Sumber: BPS Kota Solok

Sebelum pandemi COVID-19 pada tahun 2020, besaran nilai PDRB Kota Solok selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2016 PDRB nominal Kota Solok sebesar Rp. 3,24 triliun dan nilai PDRB riil sebesar Rp. 2,44 triliun. Pada tahun 2019 PDRB nominal mengalami kenaikan menjadi Rp. 4,05 triliun dan PDRB riil menjadi Rp. 2,88 triliun. Pada saat pandemi COVID-19, PDRB Kota Solok mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 PDRB nominal mengalami penurunan menjadi Rp. 4,04 triliun dan PDRB riil menjadi Rp. 2,84 triliun. Besaran nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB riil. Perbedaan besaran nilai PDRB ini dipengaruhi oleh kenaikan harga (inflasi) yang cenderung meningkat. Pada PDRB riil pengaruh inflasi telah diiadakan.

Sektor penyumbang PDRB Kota Solok terbesar berasal dari perdagangan dan reparasi, transportasi dan pergudangan, dan konstruksi. Pada tahun 2016 nilai PDRB berlaku sektor perdagangan dan reparasi sebesar Rp. 832,43 miliar meningkat menjadi Rp. 1,02 triliun pada tahun 2020. Nilai PDRB berlaku sektor transportasi dan pergudangan sebesar Rp. 504,40 miliar pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 592,88 miliar pada tahun 2020. Sedangkan besaran nilai PDRB berlaku sektor konstruksi sebesar Rp. 436,54 miliar pada tahun 2016 meningkat

menjadi Rp. 552,59 miliar pada tahun 2020. Peningkatan juga terjadi pada PDRB riil Kota Solok dimana Pada tahun 2016 nilai PDRB riil sektor perdagangan dan reparasi sebesar Rp. 611,88 miliar meningkat menjadi Rp. 723,50 miliar pada tahun 2020. Sementara itu, nilai PDRB riil sektor transportasi dan pergudangan sebesar Rp. 393,69 miliar pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 473,82 miliar pada tahun 2020. Selanjutnya besaran nilai PDRB riil sektor konstruksi sebesar Rp. 299,54 miliar pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 351,87 miliar pada tahun 2020. Ketiga sektor ini merupakan penopang perekonomian Kota Solok.

Tabel 4.1.  
PDRB Kota Solok Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2016-2020

Lapangan Usaha PDRB	Atas Dasar Harga Berlaku					Atas Dasar Harga Konstan 2010				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	195,57	201,49	209,20	220,55	222,77	140,49	143,45	144,87	148,25	150,45
B. Pertambangan, Penggalian	23,97	24,79	25,61	25,29	24,91	16,46	16,81	17,16	16,80	16,44
C. Industri Pengolahan	170,43	172,79	177,15	165,95	167,23	142,85	144,32	147,18	140,22	136,93
D. Pengadaan Listrik dan Gas	2,19	2,31	2,45	2,71	2,56	1,38	1,44	1,50	1,54	1,44
E. Pengadaan Air, Daur Ulang	6,08	6,33	6,60	7,14	7,39	4,89	5,07	5,28	5,52	5,70
F. Konstruksi	436,54	471,56	508,90	552,63	552,59	299,54	320,11	340,38	362,27	351,87
G. Perdagangan, Reparasi	832,43	881,96	954,58	1.032,74	1.019,89	611,88	646,19	685,58	725,16	723,50
H. Transportasi, Pergudangan	504,40	547,47	586,29	641,68	592,88	393,69	422,71	450,17	483,20	437,82
I. Akomodasi, Makan Minum	72,97	79,12	87,46	97,26	88,08	48,15	51,65	55,85	60,07	53,51
J. Informasi, Komunikasi	186,10	205,91	230,39	261,78	282,24	184,37	200,98	217,94	236,36	256,24
K. Keuangan, Asuransi	144,22	149,49	155,58	166,07	170,41	107,58	110,29	111,91	114,76	116,13
L. Real Estat	88,58	93,56	100,29	108,93	109,94	62,58	65,54	68,67	72,45	72,56
M. Jasa Perusahaan	0,56	0,60	0,64	0,71	0,70	0,40	0,42	0,44	0,47	0,45
O. Pemerintahan, Jaminan Sosial	268,01	292,99	313,92	346,74	369,14	205,77	214,40	226,47	236,93	235,63
P. Jasa Pendidikan	169,99	188,33	203,75	232,03	247,59	117,42	127,95	136,48	147,64	156,63
Q. Jasa Kesehatan, Keg Sosial	46,13	49,89	54,51	60,69	66,87	35,52	37,98	40,84	42,91	46,13
R. Jasa Lainnya	93,07	100,45	110,94	125,00	116,47	67,16	71,47	75,98	81,93	74,35
<b>PDRB</b>	<b>3.241,25</b>	<b>3.469,04</b>	<b>3.728,26</b>	<b>4.047,92</b>	<b>4.041,65</b>	<b>2.440,13</b>	<b>2.580,78</b>	<b>2.726,71</b>	<b>2.876,46</b>	<b>2.835,75</b>

Sumber: BPS Kota Solok

Transformasi struktur ekonomi Kota Solok tidak banyak mengalami perubahan. Struktur ekonomi Kota Solok selama periode 2016-2020 masih didominasi oleh sektor perdagangan dan reparasi, sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor konstruksi. Rata-rata kontribusi sektor perdagangan dan reparasi berkisar antara 25%-26% per tahun, sektor transportasi dan pergudangan berkisar antara 15%-16% per tahun, dan sektor konstruksi berkisar antara 12%-14% per tahun dalam PDRB Kota Solok. Besarnya kontribusi ketiga sektor tersebut merupakan ciri dari struktur ekonomi sebuah kota.

Tabel 4.2.  
Distribusi PDRB Kota Solok Menurut Lapangan Usaha (%), 2016-2020

Lapangan Usaha PDRB	Atas Dasar Harga Berlaku					Atas Dasar Harga Konstan 2010				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	6,03	5,81	5,61	5,45	5,51	5,76	5,56	5,31	5,15	5,31
B. Pertambangan, Penggalian	0,74	0,71	0,69	0,62	0,62	0,67	0,65	0,63	0,58	0,58
C. Industri Pengolahan	5,26	4,98	4,75	4,10	4,14	5,85	5,59	5,40	4,87	4,83
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
E. Pengadaan Air, Daur Ulang	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18	0,20	0,20	0,19	0,19	0,20
F. Konstruksi	13,47	13,59	13,65	13,65	13,67	12,28	12,40	12,48	12,59	12,41
G. Perdagangan, Reparasi	25,68	25,42	25,60	25,51	25,23	25,08	25,04	25,14	25,21	25,51
H. Transportasi, Pergudangan	15,56	15,78	15,73	15,85	14,67	16,13	16,38	16,51	16,80	15,44
I. Akomodasi, Makan Minum	2,25	2,28	2,35	2,40	2,18	1,97	2,00	2,05	2,09	1,89
J. Informasi, Komunikasi	5,74	5,94	6,18	6,47	6,98	7,56	7,79	7,99	8,22	9,04
K. Keuangan, Asuransi	4,45	4,31	4,17	4,10	4,22	4,41	4,27	4,10	3,99	4,10
L. Real Estat	2,73	2,70	2,69	2,69	2,72	2,56	2,54	2,52	2,52	2,56
M. Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
O. Pemerintahan, Jaminan Sosial	8,27	8,45	8,42	8,57	9,13	8,43	8,31	8,31	8,24	8,31
P. Jasa Pendidikan	5,24	5,43	5,46	5,73	6,13	4,81	4,96	5,01	5,13	5,52
Q. Jasa Kesehatan, Keg Sosial	1,42	1,44	1,46	1,50	1,65	1,46	1,47	1,50	1,49	1,63
R. Jasa Lainnya	2,87	2,90	2,98	3,09	2,88	2,75	2,77	2,79	2,85	2,62
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kota Solok

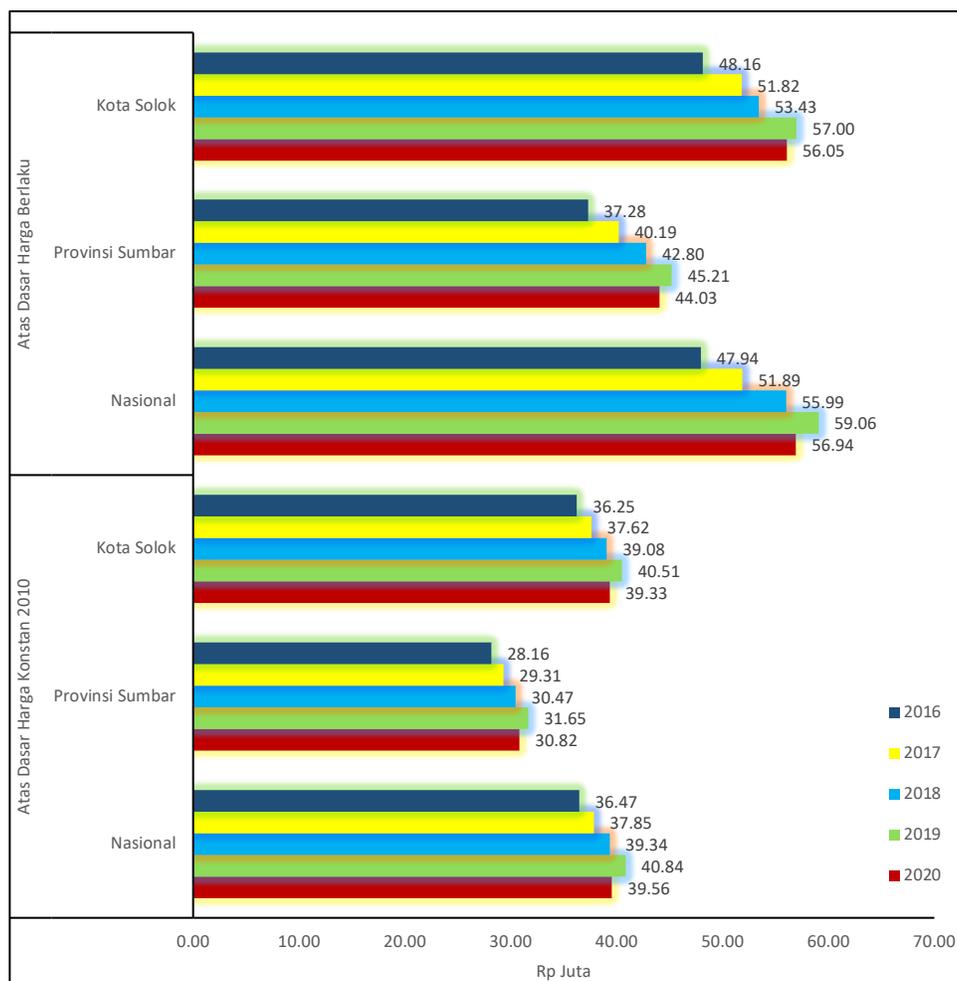
Perubahan struktural ekonomi Kota Solok belum sepenuhnya meninggalkan sektor pertanian walaupun karakteristik ekonomi sebuah perkotaan bukanlah berbasis pertanian. Hanya saja laju pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian dalam komposisi perekonomian Kota Solok relatif rendah dan cenderung stabil. Kalaupun sektor pertanian tetap tumbuh, pertanian Kota Solok seharusnya lebih intensif menerapkan konsep pertanian perkotaan (*urban farming*) berbasis teknologi tepat guna yang ramah lingkungan. Namun hal ini tidak terjadi di Kota Solok. Kondisi ini diduga disebabkan oleh sektor pertanian Kota Solok mengalami kekurangan pekerja produktif yang memiliki keahlian pertanian modern yang cenderung memilih bekerja ke sektor perdagangan dan reparasi, keuangan, pendidikan, informasi dan komunikasi. Fakta ini disebabkan sektor-sektor itu lebih menjanjikan perbaikan kesejahteraan dibandingkan tetap menjalankan kegiatan sektor pertanian yang tidak mengalami perbaikan teknologi secara signifikan. Selain itu, makin berkurangnya tanah persawahan produktif yang beralih fungsi menjadi kawasan perumahan, pemukiman dan kegiatan bisnis juga menjadi faktor pendorong lambannya perkembangan sektor pertanian di Kota Solok.

#### **4.1.2. Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Solok**

PDRB per kapita merupakan sebuah konsensus untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi (*the measurement of well-being*) dan/atau tingkat standar hidup (*the level of standard of living*). Semakin tinggi PDRB per kapita menggambarkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan atau standar kehidupan pada suatu daerah. Analisis PDRB per kapita Kota Solok dibedakan menjadi PDRB nominal per kapita dan PDRB riil per kapita. PDRB nominal digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk Kota Solok secara umum tetapi belum melakukan pembelian barang dan jasa (*potential demand*), sedangkan PDRB riil per kapita dipakai untuk mengukur kemampuan daya beli penduduk untuk jenis barang dan jasa pada berbagai tingkat harga (*effective demand*).

Sebelum terjadinya pandemi COVID-19 pada periode 2016-2019, PDRB per kapita Kota Solok baik nominal maupun riil mengalami peningkatan. PDRB nominal per kapita meningkat dari Rp. 48,16 juta pada tahun 2016 menjadi Rp. 57 juta pada tahun 2019. Kondisi yang sama juga terjadi pada PDRB riil per kapita dimana pada tahun 2016 sebesar Rp. 36,25 menjadi Rp. 40,51 juta pada tahun 2019. Rata-rata PDRB nominal perkapita sebesar Rp. 54,58 juta per tahun dan PDRB riil per kapita sebesar Rp. 39,13 juta per tahun. Lebih lanjut dapat dilihat bahwa rata-rata PDRB per kapita Kota Solok baik nominal maupun riil telah berada diatas PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat tetapi masih dibawah PDRB per kapita nasional.

Gambar 4.2.  
Perkembangan PDRB per Kapita Kota Solok (Rp. Juta), 2016-2020



Sumber: BPS

Pada saat pandemi COVID-19 tahun 2020, PDRB per kapita Kota Solok baik secara nominal maupun riil mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan PDRB per kapita Kota Solok mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. PDRB nominal per kapita menurun dari Rp. 57 juta pada tahun 2019 menjadi Rp. 56,05 juta pada tahun. Kondisi yang sama juga terjadi pada PDRB riil per kapita dimana pada tahun 2019 sebesar Rp. 40,51 menjadi Rp. 39,33 juta pada tahun 2020. COVID-19 telah memperburuk tingkat kesejahteraan dan standar hidup penduduk Kota Solok. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesejahteraan dan standar hidup masyarakat Kota Solok yang tergambar pada PDRB per kapita maka dibutuhkan investasi yang cukup besar untuk menggairahkan kembali aktivitas ekonomi riil masyarakat Kota Solok bersamaan dengan kebijakan ekonomi *pro-growth*, *pro-poor*, dan *pro-job*. Investasi *pro-poor* bukan berarti investasi infrastruktur pembangunan saja tetapi juga investasi sumber daya manusia yang akan menggerakkan pembangunan Kota Solok.

#### **4.1.3. Perbandingan PDRB per Kapita Antar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat**

Untuk mengetahui posisi tingkat kesejahteraan ekonomi (*the measurement of well-being*) dan/atau tingkat standar hidup (*the level of standard of living*) Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat maka dilakukan analisis perbandingan PDRB per kapita Kota Solok dengan PDRB per kapita kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, analisis perbandingan perbandingan PDRB per kapita antar kabupaten/kota juga diperlukan untuk merumuskan strategi dan kebijakan Kota Solok dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan tingkat kesejahteraan yang telah dicapai oleh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 4.3.  
PDRB per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Juta Rupiah), 2016-2020

Wilayah	PDRB per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Ribu Rupiah)									
	Atas Dasar Harga Berlaku					Atas Dasar Harga Konstan 2010				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Kepulauan Mentawai	42,83	46,10	47,06	50,44	49,46	29,99	30,92	31,82	32,73	31,59
Pesisir Selatan	24,84	27,38	28,32	30,25	29,96	18,14	18,98	19,84	20,64	20,28
Kab,Solok	30,18	32,49	34,10	36,36	35,96	23,24	24,32	25,41	26,53	26,07
Sijunjung	32,87	34,67	36,31	38,46	37,87	25,76	26,67	27,57	28,47	27,74
Tanah Datar	31,05	33,53	35,13	37,58	37,34	24,17	25,34	26,55	27,81	27,45
Padang Pariaman	42,91	46,67	49,45	51,14	42,95	28,63	30,05	31,51	32,08	28,58
Agam	34,72	37,62	39,24	41,80	41,19	26,14	27,36	28,58	29,74	29,13
Lima Puluh Kota	34,03	36,65	38,27	40,79	40,24	25,80	26,92	28,07	29,24	28,66
Pasaman	26,89	29,04	29,87	31,66	31,32	19,59	20,36	21,16	21,96	21,57
Solok Selatan	28,26	30,11	30,97	32,57	31,81	21,11	21,82	22,52	23,25	22,60
Dharmasraya	36,80	39,42	40,14	41,78	40,41	28,30	29,07	29,82	30,54	29,41
Pasaman Barat	30,55	32,92	33,52	34,69	33,75	23,54	24,30	25,08	25,72	24,93
Padang	53,98	58,11	61,24	65,65	64,67	40,82	42,81	44,81	46,76	45,35
Kota Solok	48,16	51,82	53,43	57,00	56,05	36,25	37,62	39,08	40,51	39,33
Sawahlunto	48,34	52,34	55,00	58,85	58,02	39,17	41,00	42,90	44,73	43,81
Padang Panjang	53,64	57,76	60,35	64,72	63,82	42,27	44,12	46,13	48,06	46,74
Bukittinggi	54,39	58,78	62,21	66,49	65,00	41,45	43,25	45,13	47,04	45,55
Payakumbuh	40,08	43,68	45,88	50,34	49,63	29,02	30,33	31,70	33,11	32,10
Pariaman	47,11	50,64	52,68	56,56	55,86	35,74	37,34	38,93	40,59	39,65
Sumatera Barat	37,28	40,19	42,80	45,21	44,03	28,16	29,31	30,47	31,65	30,82
Indonesia	47,94	51,89	55,99	59,06	56,94	36,47	37,85	39,34	40,84	39,56

Sumber: BPS

Sebelum COVID-19 pada tahun 2020, perkembangan PDRB per kapita Kota Solok dalam empat tahun terakhir (2016-2019) ini memperlihatkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2019 PDRB nominal per kapita Kota Solok cukup tinggi yakni mencapai Rp.57 juta dan PDRB riil per kapita mencapai Rp. 40,51 juta. Capaian ini lebih tinggi dari PDRB nominal perkapita Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 45,21 juta dan PDRB riil per kapita Provinsi Sumatera Barat sebesar 31,65 juta. Walaupun demikian, capaian PDRB per kapita Kota Solok masih berada di bawah PDRB per kapita nasional baik PDRB nominal per kapita (Rp. 59,08 juta) dan PDRB riil per kapita (Rp. 40,84 juta). Peringkat PDRB per kapita Kota Solok di antara

kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat berada pada peringkat enam. Sementara jika dibandingkan dengan kota-kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, PDRB per kapita Kota Solok berada pada posisi dua besar terendah. Pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020, posisi PDRB Kota Solok tidak mengalami perubahan baik diantara kabupaten/kota maupun antar kota saja. Kondisi ini disebabkan semua kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan PDRB per kapita.

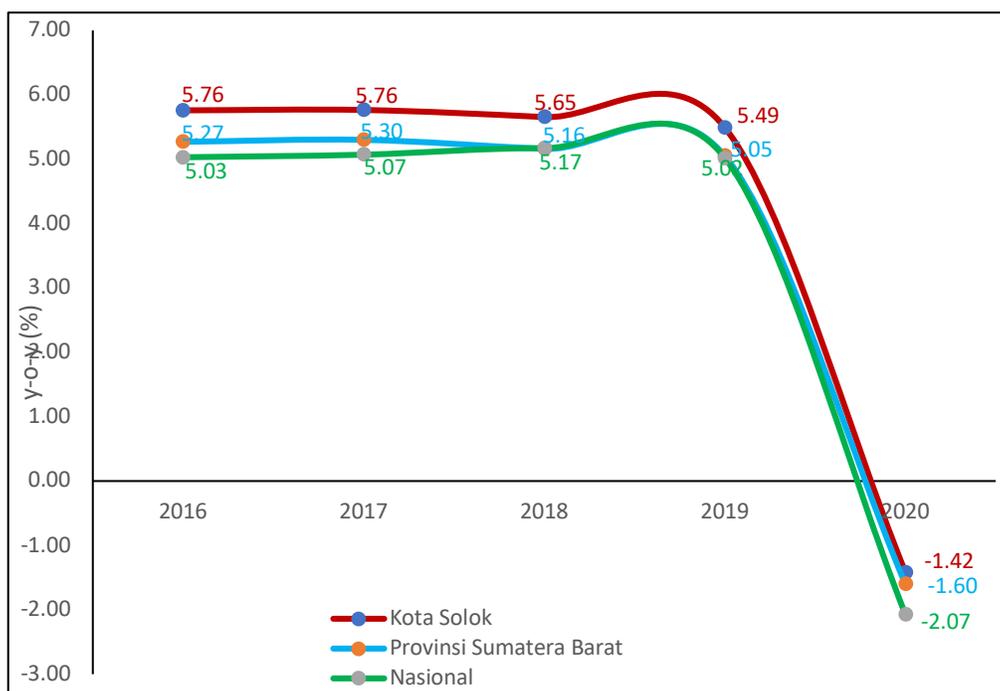
Walaupun PDRB per kapita Kota Solok menempati posisi enam besar di antara kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, tidak dapat disimpulkan secara langsung bahwa kualitas kesejahteraan masyarakat Kota Solok berada pada posisi yang sama dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera. Oleh karena itu, untuk melihat kesejahteraan masyarakat yang berkualitas maka perlu pula mempertimbangkan indikator-indikator ekonomi lain seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, ketimpangan ekonomi, maupun tingkat pengangguran.

#### **4.2. Laju Pertumbuhan**

Secara umum, rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Kota Solok selama periode 2016-2020 mencapai 4,25% per tahun. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Solok berada diatas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional (3,64% per tahun) dan Provinsi Sumatera Barat (3,84% per tahun). Jika memperhatikan pola laju pertumbuhan ekonomi Kota Solok terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Sumatera Barat maka terlihat kemiripan pola. Pada saat laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan nasional mengalami peningkatan pertumbuhan pada tahun 2016-2017, laju pertumbuhan ekonomi Kota Solok juga mengalami peningkatan. Sebaliknya, ketika laju pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Sumatera Barat mengalami perlambatan bahkan kontraksi pada tahun 2020 maka laju pertumbuhan ekonomi Kota Solok juga mengalami perlambatan dan kontraksi. Kontraksi ekonomi Kota Solok, Provinsi

Sumatera Barat, dan nasional pada tahun 2020 terjadi pada masa pandemi COVID-19. COVID-19 telah mendisrupsi berbagai aktivitas ekonomi riil baik pada sisi penawaran maupun pada sisi permintaan. Pada masa pandemi COVID-19 kontraksi laju pertumbuhan ekonomi Kota Solok (-1,42%) tidak sebesar kontraksi laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan nasional masing-masing sebesar -1,60% dan -2,07%.

Gambar 4.3.  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Solok (%), 2016-2020



Sumber: BPS

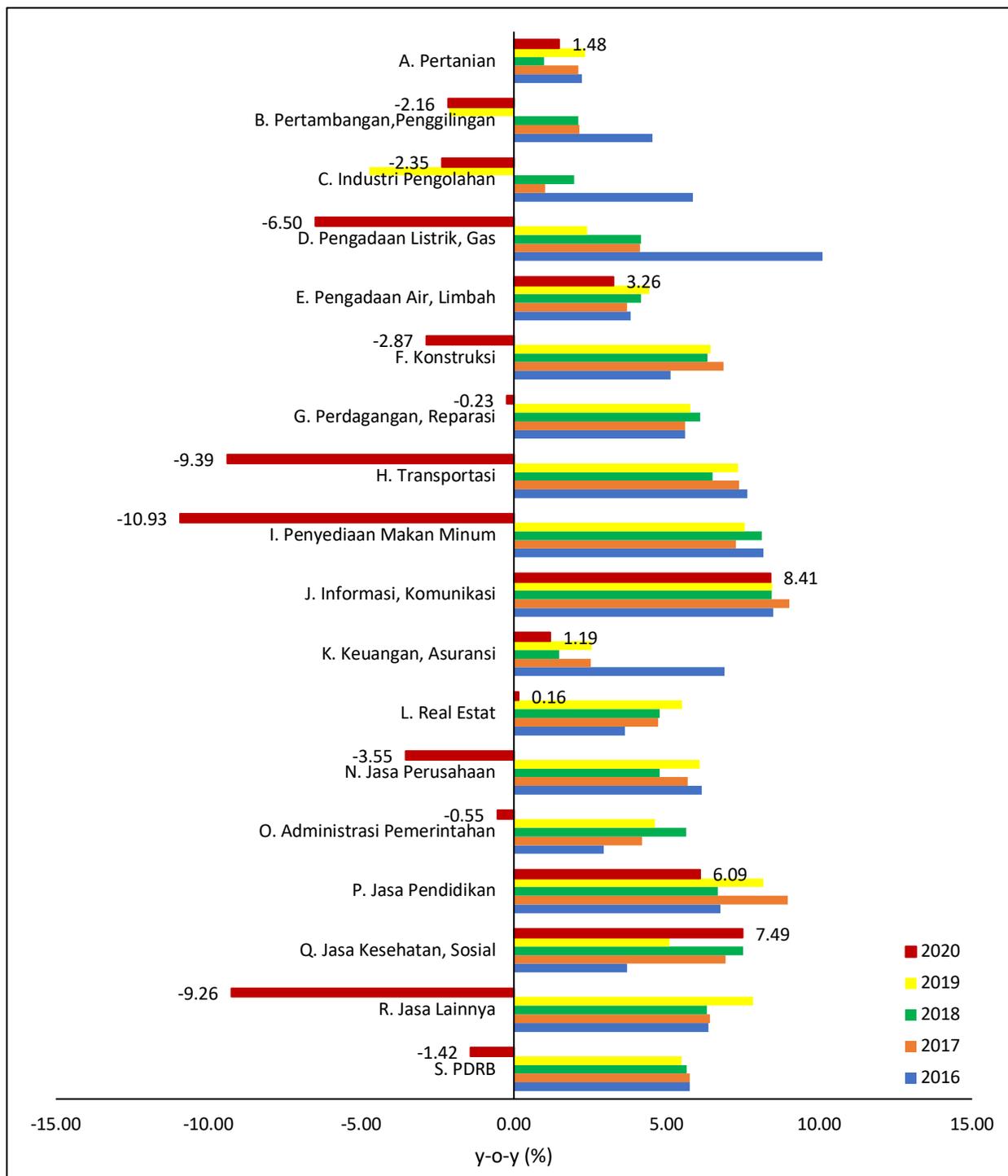
Kemiripan pola laju pertumbuhan ekonomi Kota Solok dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan nasional mengindikasikan bahwa perkembangan perekonomian Kota Solok masih sangat tergantung dengan kondisi perekonomian nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Kondisi ini mengimplikasikan bahwa penerapan strategi dan kebijakan ekonomi pada level nasional dan Provinsi Sumatera Barat secara langsung mempengaruhi perekonomian Kota Solok sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perekonomian nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Fakta ini juga mengimplikasikan bahwa perencanaan strategi dan kebijakan

pembangunan ekonomi makro yang diambil oleh pemerintah daerah Kota Solok harus menyesuaikan dengan kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang berfondasi pada potensi riil ekonomi Kota Solok.

Secara spesifik, analisis laju pertumbuhan ekonomi Kota Solok dapat ditelusuri dari laju pertumbuhan sisi penawaran dan sisi permintaan. Pada sisi penawaran lapangan usaha Kota Solok mengalami laju pertumbuhan yang beragam antar sektor. Perbedaan laju pertumbuhan antar lapangan usaha mengimplikasikan perbedaan kapasitas produksi, pasar, penggunaan teknologi, kualitas sumber daya manusia, perdagangan dan persaingan yang dihadapi oleh masing masing lapangan usaha. Sebelum COVID-19, kinerja laju pertumbuhan lapangan usaha seperti transportasi, perdagangan dan reparasi, dan konstruksi yang mendominasi struktur ekonomi Kota Solok relatif stabil berkisar antara 5% - 7%.

COVID-19 telah mendorong lapangan usaha transportasi, perdagangan dan reparasi mengalami kontraksi yang cukup tajam masing-masing sebesar -9,39%, -0,23%, dan -2,87%. Karena lapangan usaha transportasi, perdagangan dan reparasi mendominasi output perekonomian Kota Solok maka ketika terjadi kontraksi pada ketiga sektor ini secara langsung telah membuat laju pertumbuhan ekonomi agregat Kota Solok terkontraksi. Tidak hanya ketiga sektor itu, COVID-19 telah membuat hampir keseluruhan lapangan usaha mengalami kontraksi kecuali lapangan usaha pertanian, pengadaan air dan limbah, informasi dan komunikasi, keuangan dan asuransi, real estat, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan dan sosial. Dampak pandemi COVID-19 terhadap kegiatan ekonomi sangat berbeda dibandingkan dampak krisis ekonomi yang pernah terjadi sebelumnya. Pandemi COVID-19 telah berdampak pada sisi produksi dan sisi permintaan secara bersamaan. Disamping itu, pada kondisi pandemi COVID-19 telah membatasi aktivitas pelaku ekonomi riil sehingga kegiatan ekonomi masih sulit berjalan secara normal karena penerapan protokol kesehatan.

Gambar 4.4.  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Solok Menurut Lapangan Usaha (%), 2016-2020



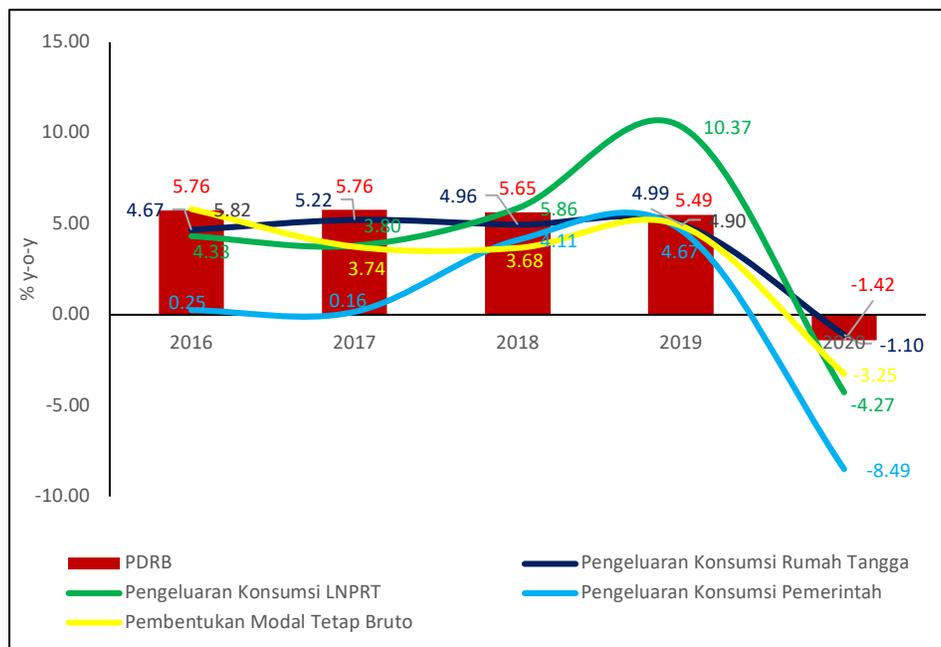
Sumber: BPS Kota Solok

Walaupun pandemi COVID-19 telah mendorong membuat hampir keseluruhan lapangan usaha mengalami kontraksi, beberapa lapangan usaha justru mengalami pertumbuhan positif. Beberapa lapangan usaha yang masih mengalami pertumbuhan positif di masa pandemi COVID-19 adalah lapangan usaha pertanian, pengadaan air dan limbah, informasi dan komunikasi, keuangan dan asuransi, real estat, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan dan sosial. Lapangan usaha yang mengalami laju pertumbuhan diatas 6% pada masa pandemi COVID-19 adalah informasi dan komunikasi (8,41%), jasa pendidikan (6,09%), dan jasa kesehatan dan sosial (7,49%). Kondisi ini dapat dipahami karena penerapan protokol kesehatan yang ketat telah mengalihkan kegiatan ekonomi memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dan permintaan produk kesehatan yang meningkat.

Sementara itu, analisis laju pertumbuhan ekonomi Kota Solok perlu pula melihat laju pertumbuhan sisi permintaan oleh pengguna akhir. Laju pertumbuhan ekonomi komponen sisi permintaan berfluktuasi sepanjang periode 2016-2020. Fluktuasi pertumbuhan komponen sisi permintaan yang paling mencolok adalah pengeluaran konsumsi lembaga nirlaba yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT berkisar antara 4% hingga 11% pada periode 2016-2019, sedangkan laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah berada pada kisaran 0.25% - 6% selama periode 2016-2019. Selanjutnya, laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga berkisar 4%-5% pada periode 2016-2019. Sementara itu, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebagai lokomotif penggerak pertumbuhan ekonomi Kota Solok mengalami laju pertumbuhan pada kisaran 3%-6% selama periode 2016-2019. Fluktuasi laju pertumbuhan PMTB menggambarkan fluktuasi investasi Kota Solok. Selain itu, laju pertumbuhan PMTB juga mengimplikasikan kemampuan Kota Solok dalam menarik investor dalam menanamkan modalnya dalam bentuk investasi fisik (*physical capital*). Investasi fisik inilah yang secara tidak

langsung digunakan dalam memproduksi pada berbagai lapangan usaha sehingga mampu mendorong peningkatan output Kota Solok.

Gambar 4.5.  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Solok Menurut Pengeluaran (%), 2016-2020



Sumber: BPS Kota Solok

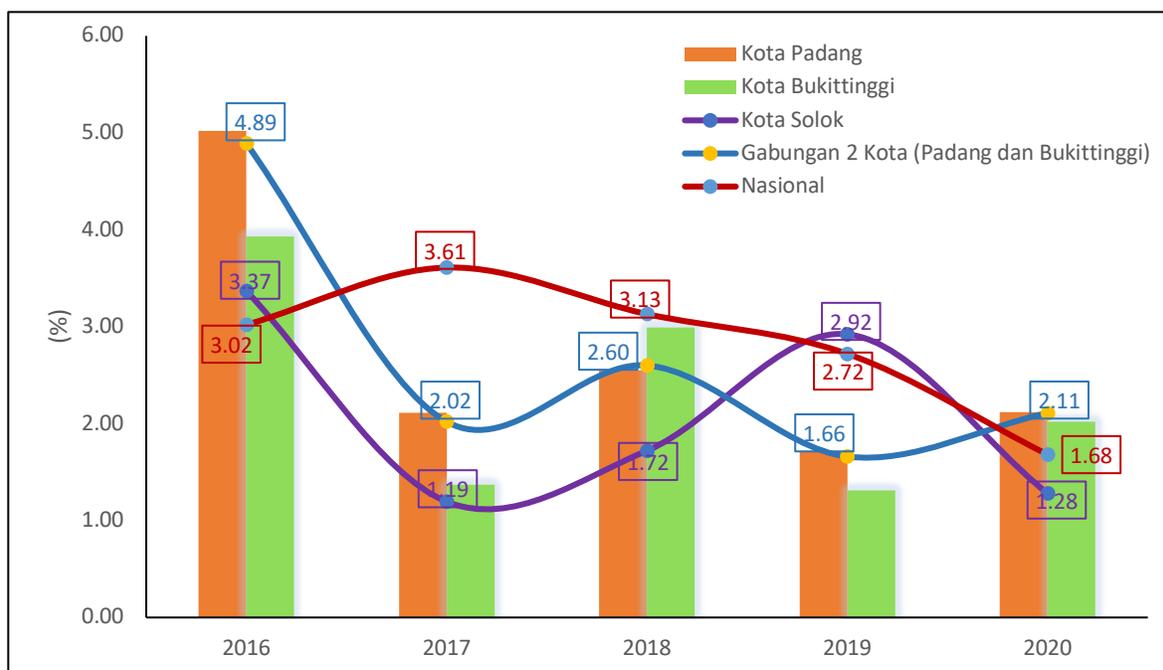
Selama periode 2016-2019 seluruh komponen pengeluaran mengalami pertumbuhan positif dan berfluktuasi, tetapi pada tahun 2020 dimana kondisi pandemi COVID-19 terjadi dan masih berlangsung maka seluruh komponen pengeluaran mengalami kontraksi. Kontraksi pertumbuhan pada sisi permintaan yang paling tajam terlihat pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar -8,49% dan diikuti oleh komponen pengeluaran konsumsi LNPRT (-4,27%), PMTB (-3,25%), dan pengeluaran rumah tangga (-1,10%). COVID-19 telah menyebabkan sumber kontraksi terdapat pada komponen pengeluaran pemerintah Kota Solok. Pandemi COVID-19 telah menghendaki *refocussing* anggaran belanja pemerintah, barang, modal dan bantuan sosial (bansos) sehingga berakibat pada penurunan belanja pegawai, barang dan modal di Kota Solok.

### 4.3. Inflasi

#### 4.3.1. Perkembangan Inflasi Kota Solok

Prasyarat pembangunan ekonomi yang berkesinambungan adalah kondisi ekonomi yang stabil. Salah satu faktor yang menjadi perhatian dalam menjaga stabilitas ekonomi adalah mengkondisikan stabilitas harga. Stabilitas harga tidak hanya mampu mendorong aktivitas ekonomi produktif tetapi juga membangkitkan permintaan efektif masyarakat. Peningkatan kegiatan ekonomi produktif bersamaan dengan permintaan efektif menjadi kekuatan yang akan mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, kesejahteraan masyarakat akan sulit tercapai di dalam kondisi dimana terjadi inflasi, karenanya inflasi menjadi penting untuk diperhatikan. Data inflasi agregat Kota Solok diperoleh dari PDRB deflator, sedangkan untuk analisisnya mengacu pada data inflasi Kota Padang dan Kota Bukittinggi.

Gambar 4.6.  
Perkembangan Inflasi Kota Solok, Provinsi Sumbar dan Nasional (% y-o-y), 2016-2020



Sumber: Diolah dari Data BPS

Selama periode 2016-2020, rata-rata laju inflasi Kota Solok sebesar 2,10% per tahun, Kota Padang sebesar 2,70%, Kota Bukittinggi sebesar 2,32% per tahun, dan gabungan Kota Padang dan Kota Bukittinggi sebesar 2,66% per tahun. Kondisi inflasi di Kota Solok dan gabungan Kota Padang dan Kota Bukittinggi berada dibawah laju inflasi nasional sebesar 2,83% per tahun. Jika diperhatikan pola laju inflasi Kota Solok, gabungan Kota Padang dan Kota Bukittinggi dengan nasional maka terlihat laju inflasi Kota Solok dan gabungan Kota Padang dan Kota Bukittinggi lebih fluktuatif dibandingkan dengan laju inflasi nasional. Pada tahun 2020, laju inflasi Kota Solok telah mencapai 1,28% dibawah laju inflasi nasional dan gabungan Kota Padang dan Kota Bukittinggi yang masing-masing sebesar 1,68% dan 2,11%. Jika kondisi dapat dipertahankan maka daya beli konsumen akhir di Kota Solok akan mengalami. Rendahnya inflasi di Kota Solok disebabkan relatif lebih terjaganya pasokan pangan yang menjadi sumber utama penyumbang inflasi. Kondisi ini juga disebabkan kondisi COVID-19 yang masih berlangsung dimana permintaan masih dibawah penawaran. Selain itu, berbagai kecenderungan kebijakan pemerintah untuk dalam mengendalikan harga bahan pangan strategis, imbas pelemahan daya beli masyarakat sebagai dampak perlambatan ekonomi sebagai akibat COVID-19 menjadi faktor-faktor dominan yang menjadikan meredanya inflasi di Kota Solok dan Sumatera Barat.

#### **4.3.2. Inflasi menurut Kelompok Barang Dan Jasa**

Untuk menganalisis sumber-sumber inflasi maka eksplorasi dilakukan dengan melakukan disagregasi inflasi. Disagregasi inflasi Kota Solok mengacu pada kajian ekonomi regional Bank Indonesia Padang dan data BPS Provinsi Sumatera Barat. Fakta ini disebabkan data disagregasi inflasi Kota Solok belum tersedia. Basis pemantauan inflasi di Provinsi Sumatera Barat adalah Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Survei pemantauan harga yang dilakukan oleh BPS Provinsi Sumatera Barat dan Bank Indonesia hanya mencakup Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Oleh

karena itu, analisis disagregasi inflasi Kota Solok menggunakan data disagregasi inflasi gabungan Kota Padang dan Bukittinggi.

Secara agregat, selama periode 2017-2020, inflasi gabungan Kota Padang dan Kota Bukittinggi mengalami penurunan. Penurunan inflasi agregat dapat dilihat dari disagregasi inflasi melalui kelompok barang dan jasa. Disagregasi inflasi dapat menampakkan komposisi penyumbang inflasi. Selama periode 2017 hingga 2020 telah terjadi perubahan komposisi penyumbang inflasi. Komposisi penyumbang inflasi pada tahun 2020 mayoritas disebabkan peningkatan harga secara umum di kelompok bahan makanan dan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau. Kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga memiliki kontribusi paling signifikan dalam pembentukan angka inflasi pada tahun 2020 mencapai 0,86% dan diikuti kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau mencapai 0,85%. Pandemi COVID-19 telah mengubah cara belajar dari tatap muka (*offline*) menjadi *online*. Peralihan media belajar ini telah menyebabkan perubahan pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan ke penyediaan alat komunikasi seperti *smartphone*, *laptop*, dan *internet*.

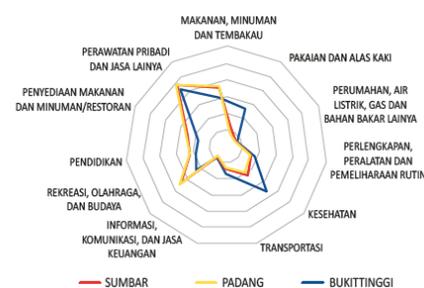
Sementara itu, andil inflasi oleh kelompok bahan makanan dan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau bersumber pada komoditas cabai merah dan bawang merah. Menurut Bank Indonesia (2021) Inflasi pada kelompok bahan makanan dan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau terutama disumbang oleh inflasi komoditas cabai merah yang masuk ke dalam sepuluh komoditas utama penyumbang inflasi di Sumatera Barat sebanyak tujuh kali (Januari, Februari, Juli, September, Oktober, November dan Desember). Sementara bawang merah menyumbang inflasi di Sumatera Barat sebanyak enam kali (Januari, April Mei, September, Oktober dan November). Peningkatan harga komoditas pangan terutama cabai merah dan bawang merah disebabkan oleh tingginya curah hujan di tahun 2020 sebagai dampak fenomena La Nina sehingga produktivitas dan distribusi pasokan menjadi terganggu.

Tabel 4.4.  
Perbandingan Inflasi dan andil inflasi Provinsi Sumatera Barat, 2016-2020

Komoditas	2017		2018		2019		2020	
	% Inflasi (yoy)	% Andil (yoy)						
Umum	2.03		2.60		1.67		2.11	
Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	3.49	0.27	3.88	0.60	1.89	0.20	4.47	0.85
Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	6.67	0.51	2.14	0.33	0.37	0.04	0.05	0.01
Sandang	3.93	0.30	2.33	0.36	4.72	0.50	1.44	0.27
Kesehatan	4.94	0.38	1.80	0.28	1.97	0.21	2.05	0.39
Pendidikan, rekreasi dan olahraga	4.71	0.36	2.62	0.41	5.83	0.61	4.56	0.86
Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	2.90	0.22	4.02	0.62	1.12	0.12	-1.44	-0.27

Sumber: Diolah dari laporan BI dan data BPS

Gambar 4.7. Inflasi Tahunan Menurut Kelompok Barang dan Jasa TW-IV (%), 2020



Sumber: BI 2021

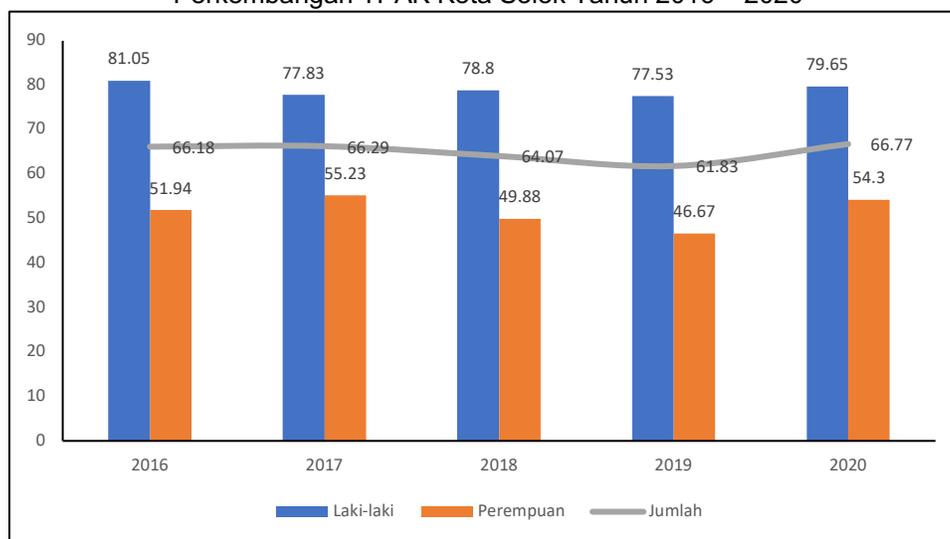
Dari pengamatan pergerakan inflasi dan faktor penyebab inflasi maka dapat diduga penyebab utama inflasi pada tahun 2017-2020 adalah dari permintaan produk (*demand full inflation*) dan peningkatan biaya produksi (*cost push inflation*) yang terjadi pada kelompok bahan makanan dan non makanan. Pada kelompok makanan diwakili oleh komoditas seperti cabai merah, bawang merah, dan beras. Sedangkan pada kelompok non makanan adalah komoditas bensin, bahan bakar rumah tangga dan biaya sekolah dasar. Walaupun demikian, secara agregat, inflasi mengalami penurunan. Kondisi penting untuk terus dijaga dan terkendali. Peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) perlu diapresiasi sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya inflasi di daerah. TPID mempunyai tugas penting untuk memantau dan menemukan solusi penyelesaian inflasi sebagai penyakit ekonomi. Sebagai bentuk sinergi dan koordinasi anggota TPID dalam merumuskan strategi pengendalian inflasi di Provinsi Sumatera Barat maka telah diselenggarakan *High Level Meeting* (HLM) TPID pada tanggal 2 Desember 2020 yang bertujuan untuk memitigasi kenaikan permintaan dan risiko kenaikan harga di akhir tahun 2020.

## 4.4. Pengangguran dan Kesempatan Kerja

### 4.4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (penduduk usia kerja). TPAK memberikan informasi tentang persentase penduduk usia kerja yang aktif pada suatu wilayah. Dengan kata lain TPAK memberikan gambaran tentang penawaran tenaga kerja (labor supply) pada suatu wilayah. TPAK Kota Solok selama lima tahun terakhir terlihat berfluktuasi. Pada tahun 2020 TPAK Kota Solok adalah 66,77 persen yang berarti sebesar 66,77 persen penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja. Fluktuasi TPAK juga terlihat jika dikategorikan berdasarkan jenis kelamin. Namun demikian, terlihat bahwa TPAK penduduk jenis kelamin laki-kaki lebih tinggi dibanding TPAK perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat disparitas gender pada penawaran tenaga kerja di Kota Solok.

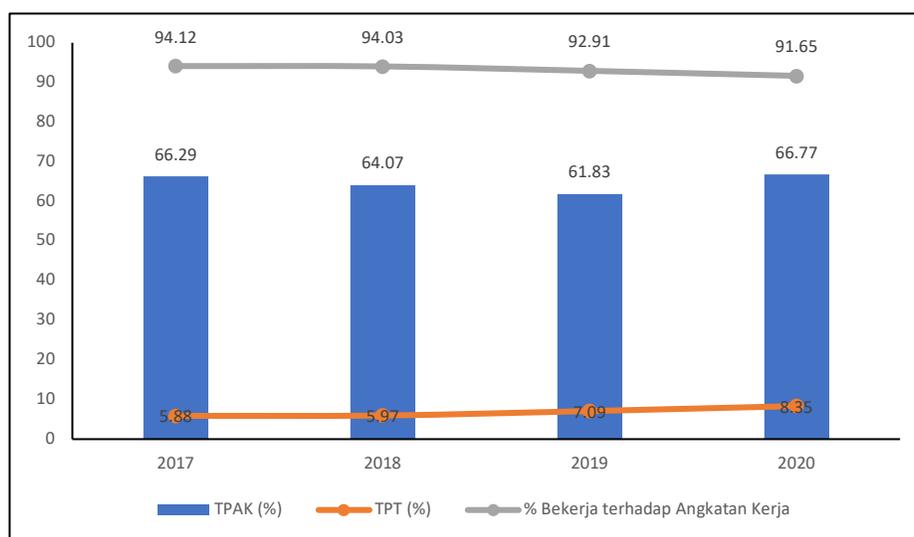
Gambar 4.8.  
Perkembangan TPAK Kota Solok Tahun 2016 – 2020



Sumber: BPS, 2016 – 2020

Angka TPAK dapat mencerminkan beberapa hal. Oleh sebab itu, peningkatan TPAK setiap tahunnya tidak serta merta mencerminkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Peningkatan TPAK dapat dikaitkan dengan perbaikan kondisi ketenagakerjaan jika peningkatan tersebut diiringi oleh peningkatan jumlah penduduk yang bekerja sekaligus penurunan penduduk yang menganggur. Jika yang terjadi sebaliknya, maka peningkatan TPAK hanya akan menyebabkan meningkatnya tingkat pengangguran. Sehubungan dengan kondisi tersebut, fakta menunjukkan bahwa peningkatan TPAK Kota Solok tidak diiringi oleh jumlah penduduk yang bekerja maupun persentase jumlah penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya yaitu meningkatnya tingkat pengangguran terbuka setiap tahunnya.

Gambar 4.9.  
Perkembangan TPAK, TPT, dan % penduduk bekerja terhadap angkatan kerja

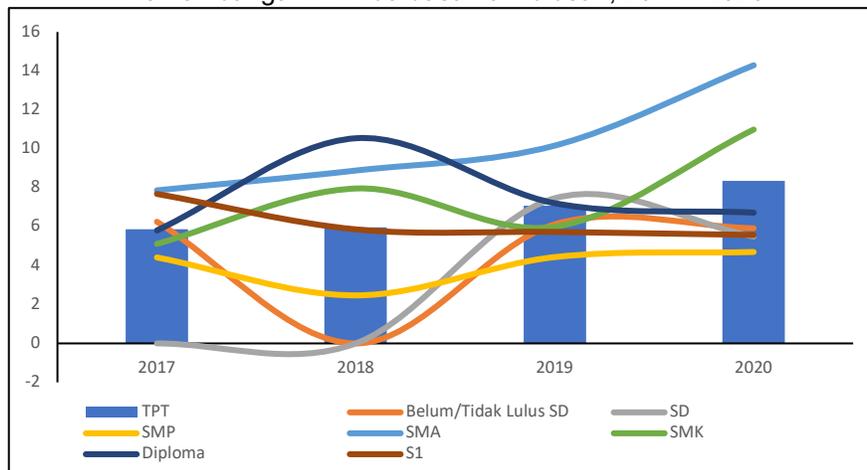


Sumber: BPS, 2017 - 2020

Pada tahun 2017 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Solok adalah 5,88 persen. TPT Kota Solok terus meningkat menjadi 8,35 persen pada tahun 2020. Walaupun pandemi Covid-19 merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan

TPT Kota Solok naik secara signifikan pada tahun 2020, namun pada dasarnya tren kenaikan pengangguran telah terjadi di Kota Solok sebelum pandemi terjadi yaitu pada periode 2017 – 2019. Dengan kata lain, pandemi covid-19 semakin memperburuk (exacerbate) kondisi yang sudah terjadi.

Gambar 4.10.  
Perkembangan TPT berdasarkan lulusan, 2017 - 2020



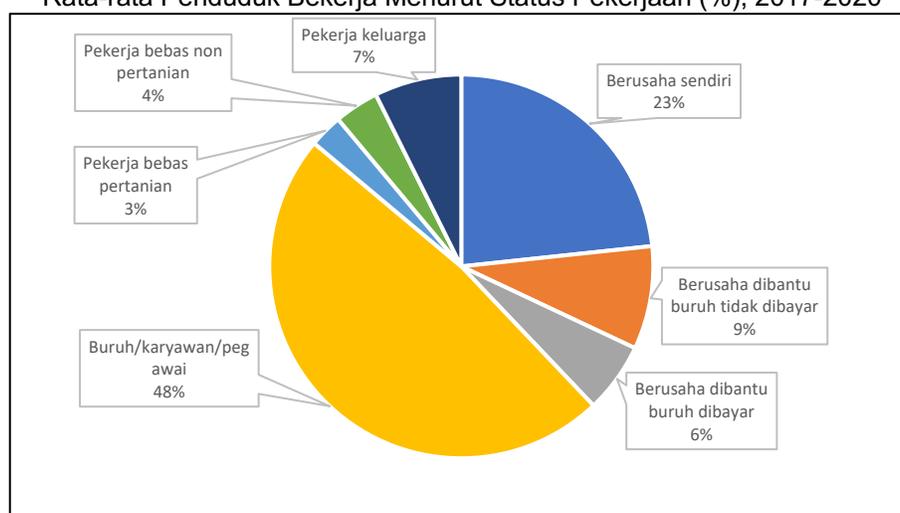
Sumber: BPS, 2017 - 2020

Berdasarkan tingkat Pendidikan, TPT Kota Solok lebih didominasi oleh penduduk lulusan SMA dan SMK yang mencapai 14,29 persen dan 10,99 persen pada tahun 2020. TPT lulusan SMA meningkat dua kali lipat pada tahun 2020 dibanding tahun 2017. Hal yang sama juga diperlihatkan oleh TPT lulusan SMK. Sebaliknya TPT lulusan S1 menunjukkan tren yang menurun. Sementara itu TPT lulusan diploma terlihat berfluktuasi pada kisaran 6 persen – 10 persen. Relatif tingginya TPT lulusan SMA dan SMK setidaknya mengindikasikan tiga hal. Pertama, kebanyakan siswa yang menamatkan SMA atau SMK tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Kedua, keahlian (skill) yang mereka dapatkan selama belajar di sekolah belum mampu memenuhi persyaratan dunia kerja. Ketiga, mereka juga tidak memiliki kemampuan berwirausaha (*entrepreneurship*) dalam

rangka menciptakan usaha sendiri. Ketidakmampuan ini bisa saja disebabkan oleh kurangnya keahlian (*skill*) yang dimiliki atau tidak memiliki modal untuk berusaha sendiri.

Status pekerjaan di Kota Solok masih didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai yaitu sebesar 48 persen dari jumlah penduduk yang bekerja. Sementara itu, proporsi penduduk yang berusaha sendiri tanpa dibantu oleh buruh tidak dibayar berjumlah 23 persen dan proporsi penduduk yang berusaha sendiri yang dibantu oleh buruh dibayar hanya sebesar enam persen. kondisi ini mengimplikasikan bahwa sebagian besar penawaran tenaga kerja di Kota Solok masih memilih untuk bekerja dengan pihak lain baik swasta maupun pemerintah. Meskipun keinginan untuk berusaha sendiri cukup besar (23 persen), namun usaha tersebut baru sebatas memenuhi perekonomian sendiri. Kedepannya pemerintah perlu mempersiapkan program dan kebijakan agar proporsi status pekerjaan berusaha dibantu buruh dibayar meningkat secara signifikan karena status pekerjaan ini mampu memberikan pengganda (*multiplier effect*) yang besar terhadap pendapatan dan peningkatan kesempatan kerja.

Gambar 4.11.  
Rata-rata Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan (%), 2017-2020



Sumber: BPS, 2017-2020

## 4.5. Kondisi Kemiskinan di Kota Solok

### 4.5.1. Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan

Table 4.5. menjelaskan perkembangan garis kemiskinan di Kota Solok tahun 2016 – 2020. Garis kemiskinan Kota Solok terus meningkat selama lima tahun terakhir yaitu sebesar Rp.385.781,00 pada tahun 2016 naik menjadi Rp.450.254,00 pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa standar hidup yang digunakan untuk menentukan jumlah penduduk miskin terus mengalami perbaikan setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat, garis kemiskinan Kota Solok cenderung stabil pada peringkat 6 pada tahun 2016, 2018, dan 2019.

Table 4.5.  
Garis kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Kabupaten					
1	Kepulauan Mentawai	263.793	280.695	294.284	310.033	340.191
2	Pesisir Selatan	366.228	390.955	409.882	431.817	467.743
3	Kab. Solok	376.748	400.887	408.570	415.649	451.906
4	Sijunjung	344.153	365.074	379.046	400.861	433.147
5	Tanah Datar	346.267	361.037	369.833	379.041	420.049
6	Padang Pariaman	374.636	385.736	402.960	411.182	455.463
7	Agam	315.804	327.004	341.372	379.304	424.728
8	Lima Puluh Kota	357.824	370.506	388.689	403.030	451.295
9	Pasaman	307.552	320.478	334.800	347.153	388.726
10	Solok Selatan	326.733	347.667	364.498	387.438	419.442
11	Dharmasraya	374.642	398.408	414.096	439.117	477.421
12	Pasaman Barat	367.159	382.820	402.877	417.742	467.769
	Kota					
1	Padang	449.658	482.763	507.042	534.857	570.654
2	Kota Solok	385.781	413.297	414.673	440.618	450.254
3	Sawahlunto	318.721	337.682	354.665	374.615	399.688
4	Padang Panjang	420.981	424.298	438.075	450.377	491.142
5	Bukittinggi	420.478	441.087	459.371	475.755	519.470
6	Payakumbuh	424.233	441.736	462.243	482.184	526.490
7	Pariaman	392.970	412.231	431.368	446.514	480.028
	SUMATERA BARAT (Provinsi)	425.141	453.612	476.554	503.652	544.315

Sumber: BPS, 2021

Pada tahun 2015 garis kemiskinan Kota Solok sempat menduduki peringkat 5. Namun demikian, garis kemiskinan Kota Solok turun drastis ke peringkat 12 pada tahun

2020. Sebagai tambahan, pada periode 2016 – 2020 rata-rata garis kemiskinan Kota Solok sebesar Rp.420.924,60 masih berada dibawah rata-rata garis kemiskinan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp.480.654,80.

Selanjutnya data garis kemiskinan seperti pada tabel 4.6. menentukan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Solok. Secara absolut jumlah penduduk miskin di Kota Solok terus mengalami penurunan sejak tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2016, penduduk miskin Kota Solok sebesar 2,59 ribu jiwa dan turun menjadi 1,99 ribu jiwa pada tahun 2020. Dengan kata lain, rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin Kota Solok selama periode 2016 – 2020 adalah 6,24%. Dibanding kabupaten/kota lain di Sumatera Barat, rata-rata persentase penurunan jumlah penduduk miskin Kota Solok merupakan yang terbaik dan bahkan berhasil mengalahkan rata-rata persentase penurunan kemiskinan Sumatera Barat yang hanya sebesar 1,90 persen pada periode yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa program-program pengentasan kemiskinan di Kota Solok berjalan dengan baik selama lima tahun terakhir.

Terdapat dua fenomena menarik dari kondisi kemiskinan (jumlah penduduk miskin) di Kota Solok. Pertama, baiknya kinerja penurunan jumlah penduduk miskin Kota Solok yang juga merupakan yang terbaik di Sumatera Barat tidak serta merta menunjukkan perbaikan pada pendapatan masyarakat. Kondisi ini terlihat dari korelasi negatif antara kemiskinan dan pengangguran. Pada saat jumlah penduduk miskin turun cukup signifikan, angka pengangguran di Kota Solok justru menunjukkan tren yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat belum berjalan baik. Kedua, penurunan jumlah penduduk miskin diduga lebih disebabkan oleh baiknya capaian

program pengentasan kemiskinan di Kota Solok. Bahkan hal ini terlihat semakin jelas pada tahun 2020, ditengah meningkatnya pengangguran akibat pandemi Covid-19, jumlah penduduk miskin justru menurun signifikan akibat bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka membantu masyarakat yang terdampak.

Table 4.6.  
Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat, 2016-2020

No	Kabupaten/kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten						
1	Kepulauan Mentawai	13,09	12,95	12,99	13,22	13,37
2	Pesisir Selatan	35,86	35,53	34,92	36,51	35,46
3	Kab,Solok	34,06	33,33	32,89	29,74	29,28
4	Sijunjung	17,12	16,83	16,55	16,65	16,28
5	Tanah Datar	19,63	19,27	18,48	16,20	15,34
6	Padang Pariaman	36,34	34,70	33,20	29,48	28,98
7	Agam	37,55	36,57	32,92	33,10	33,31
8	Lima Puluh Kota	28,57	26,93	26,47	26,64	26,43
9	Pasaman	20,83	20,38	20,31	20,22	20,29
10	Solok Selatan	11,91	11,89	11,85	12,49	12,39
11	Dharmasraya	16,24	15,63	15,42	15,49	15,70
12	Pasaman Barat	30,76	30,84	31,83	31,53	31,64
Kota						
1	Padang	42,56	43,75	44,04	42,44	42,17
2	Kota Solok	2,59	2,50	2,29	2,29	1,99
3	Sawahlunto	1,34	1,23	1,48	1,35	1,36
4	Padang Panjang	3,47	3,22	3,11	3,00	2,84
5	Bukittinggi	6,81	6,75	6,32	6,00	6,01
6	Payakumbuh	8,35	7,72	7,69	7,68	7,74
7	Pariaman	4,47	4,49	4,40	4,20	3,66
SUMATERA BARAT (Provinsi)		371,55	364,51	357,13	348,22	344,23

Sumber: BPS, 2021

#### 4.5.2. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Upaya untuk menanggulangi kemiskinan tidak hanya memerlukan informasi mengenai jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin pada suatu daerah saja, namun juga memerlukan informasi mengenai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1). P1 menunjukkan kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Nilai P1 yang rendah menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan diantara

penduduk miskin juga berkurang. Disamping itu P1 merupakan informasi yang sangat penting agar biaya yang dibutuhkan dalam program-program pengentasan kemiskinan menjadi lebih efisien.

Indeks kedalaman kemiskinan Kota Solok memperlihatkan kecenderungan yang menurun selama lima tahun terakhir. Selama lima tahun terakhir, Kota Solok termasuk pada tiga kabupaten/kota dengan indeks kedalaman kemiskinan paling rendah. Pada tahun 2020, indeks kedalaman kemiskinan Kota Solok sebesar 0,27 merupakan indeks kedua terendah dibawah kota Sawahlunto sebesar 0,07. Capaian indeks kedalaman kemiskinan Kota Solok juga jauh melampaui capaian indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Sumatera Barat.

Table 4.7.  
Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat, 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Kabupaten					
1	Kepulauan Mentawai	2,56	2,58	2,42	1,87	2,84
2	Pesisir Selatan	1,17	1,07	0,77	0,76	0,81
3	Kab, Solok	1,19	1,11	1,40	0,71	1,16
4	Sijunjung	1,25	1,12	0,88	0,94	0,97
5	Tanah Datar	0,81	0,55	0,87	0,42	0,42
6	Padang Pariaman	1,36	1,13	1,25	1,02	0,67
7	Agam	0,96	0,96	1,13	0,82	0,79
8	Lima Puluh Kota	1,06	1,09	1,09	0,51	0,78
9	Pasaman	0,42	0,80	0,93	0,59	0,70
10	Solok Selatan	1,23	0,89	1,03	0,84	0,79
11	Dharmasraya	1,21	0,66	0,70	0,89	0,71
12	Pasaman Barat	1,09	1,17	1,22	0,81	0,62
	Kota					
1	Padang	0,55	0,54	0,73	0,63	0,45
2	Kota Solok	0,13	0,62	0,42	0,29	0,27
3	Sawahlunto	0,12	0,29	0,27	0,23	0,07
4	Padang Panjang	0,66	0,94	0,88	0,53	0,46
5	Bukittinggi	1,05	0,57	0,39	0,56	0,56
6	Payakumbuh	0,87	0,75	0,71	0,46	0,71
7	Pariaman	0,90	0,59	0,68	0,49	0,49
	<b>SUMATERA BARAT (Provinsi)</b>	<b>1,10</b>	<b>1,00</b>	<b>1,04</b>	<b>0,94</b>	<b>0,92</b>

Sumber: BPS, 2021

### 4.5.3. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks keparahan kemiskinan (P2) menjelaskan tentang penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Nilai indeks yang tinggi menunjukkan ketimpangan yang tinggi diantara penduduk miskin. Sama halnya dengan P1, Kota Solok juga termasuk daerah dengan keparahan kemiskinan yang rendah di Sumatera Barat. Selama lima tahun terakhir, hanya pada tahun 2017 saja indeks keparahan kemiskinan kota Solok cukup tinggi sebesar 0.23 sama dengan indeks keparahan kemiskinan Provinsi Sumatera Barat. Sementara itu, secara rata-rata selama tahun 2016 – 2020 indeks keparahan kemiskinan Kota Solok sebesar 0.082 menempati urutan kedua terendah setelah Kota Sawahlunto sebesar 0.04.

Table 4.8.  
Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat, 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Kabupaten					
1	Kepulauan Mentawai	0,60	0,70	0,61	0,45	0,77
2	Pesisir Selatan	0,27	0,25	0,13	0,13	0,14
3	Kab.Solok	0,25	0,20	0,35	0,12	0,35
4	Sijunjung	0,28	0,23	0,17	0,22	0,27
5	Tanah Datar	0,15	0,11	0,19	0,06	0,06
6	Padang Pariaman	0,38	0,23	0,29	0,21	0,11
7	Agam	0,19	0,20	0,31	0,13	0,17
8	Lima Puluh Kota	0,21	0,31	0,24	0,07	0,14
9	Pasaman	0,05	0,15	0,22	0,11	0,11
10	Solok Selatan	0,31	0,17	0,23	0,21	0,15
11	Dharmasraya	0,30	0,14	0,15	0,20	0,13
12	Pasaman Barat	0,23	0,27	0,30	0,17	0,09
	Kota					
1	Padang	0,11	0,11	0,17	0,18	0,09
2	Kota Solok	0,01	0,23	0,09	0,04	0,04
3	Sawahlunto	0,01	0,07	0,07	0,05	0,00
4	Padang Panjang	0,11	0,22	0,22	0,09	0,08
5	Bukittinggi	0,30	0,10	0,06	0,12	0,20
6	Payakumbuh	0,19	0,12	0,15	0,06	0,14
7	Pariaman	0,22	0,14	0,16	0,07	0,10
	SUMATERA BARAT (Provinsi)	0,24	0,23	0,24	0,21	0,20

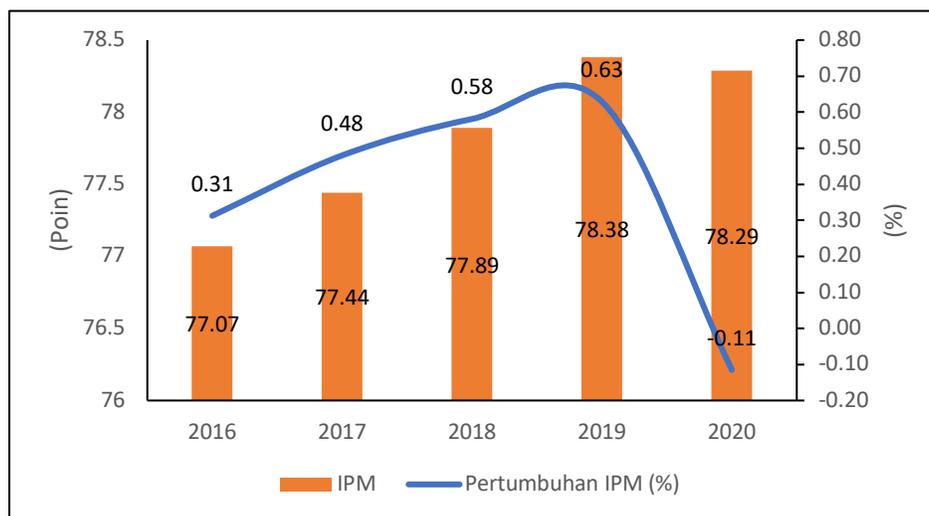
Sumber: BPS, 2021

## 4.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

### 4.6.1. Perkembangan IPM Kota Solok

IPM Kota Solok menunjukkan tren yang positif sejak tahun 2016 – 2019 kecuali tahun 2020. Pada tahun 2016 IPM Kota Solok adalah 77.07 dan naik menjadi 78.38 pada tahun 2019 kemudian turun sedikit menjadi 78,29 pada tahun 2020. Kenaikan IPM Kota Solok selama periode tersebut juga sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan IPM. Pada tahun 2016 IPM Kota Solok tumbuh sebesar 0.31 persen dan pertumbuhan tersebut terus meningkat hingga akhirnya tumbuh sebesar 0.63 persen di tahun 2019. Penurunan IPM Kota Solok tahun 2020, yang juga dialami oleh sebagian kabupaten/kota di Sumatera Barat, disebabkan oleh menurunnya pengeluaran perkapita penduduk akibat pandemi covid-19. Berdasarkan klasifikasinya, IPM Kota Solok lima tahun terakhir termasuk dalam kategori tinggi.

Gambar 4.12.  
Perkembangan IPM Kota Solok, 2016 - 2020

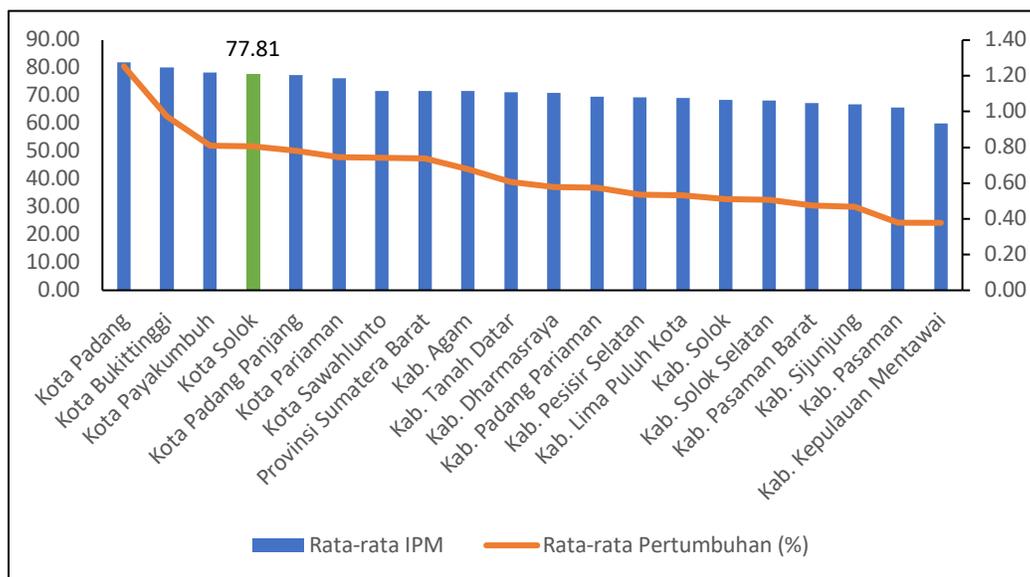


Sumber: BPS, 2016 – 2017

#### 4.6.2. Perbandingan IPM Kota Solok dengan Kabupaten/kota lain di Sumatera Barat

Rata-rata IPM Kota Solok lima tahun terakhir adalah 77,81. Angka ini berada diatas rata-rata IPM Provinsi Sumatera Barat pada periode yang sama. Dibandingkan kabupaten/kota lainnya, IPM Kota Solok menempati posisi ke empat tertinggi setelah Kota Padang, Kota Bukittinggi, dan Kota Payakumbuh. IPM Kota Padang dan Kota Bukittinggi termasuk dalam kategori sangat tinggi sementara itu IPM Kota Payakumbuh dan Kota Solok masih termasuk dalam kategori tinggi. Walaupun rata-rata IPM Kota Solok menempati posisi keempat, namun dari sisi pertumbuhan rata-rata laju IPM Kota Solok selama lima tahun terakhir (0,74 persen) masih menempati posisi ketujuh bersama-sama dengan Kota Sawahlunto. Menyikapi kondisi ini, kedepannya hal yang paling urgen dilakukan adalah menciptakan program percepatan laju pertumbuhan IPM supaya pembangunan manusia di Kota Solok masuk dalam kategori sangat tinggi.

Gambar 4.13.  
Perbandingan IPM Kota Solok dengan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat, 2016 - 2020



Sumber: BPS, 2016 – 2017

Berdasarkan indikator, angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah Kota Solok menempati urutan keempat, sedangkan harapan lama sekolah dan pengeluaran perkapita perbulan menempati urutan kelima. Namun demikian, capaian keempat indikator tersebut lebih tinggi dibanding capaian indikator IPM Provinsi Sumatera Barat. Rata-rata angka harapan hidup Kota Solok lima tahun terakhir berhasil diungguli oleh Kota Bukittinggi, Padang, dan Payakumbuh. Selanjutnya, harapan lama sekolah Kota Solok belum bisa menyaingi capaian Kota Padang, Padang Panjang, Bukittinggi, dan Pariaman. Kemudian, Kota Padang Panjang, Padang, dan Bukittinggi berhasil mengungguli Kota Solok pada indikator rata-rata lama sekolah.

Table 4.9.  
Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat, 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	Rata-rata 2016 - 2020				Rata-rata Laju Pertumbuhan 2016 - 2020 (%)			
		Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Perkapita	Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Perkapita
	Kabupaten								
1	Kepulauan Mentawai	64,53	12,36	6,87	6.140,40	0,21	2,24	2,50	2,04
2	Pesisir Selatan	70,48	13,21	8,18	9.033,80	0,26	0,43	0,37	1,86
3	Kab.Solok	68,00	13,02	7,75	9.984,40	0,36	0,25	0,76	1,75
4	Sijunjung	65,74	12,34	7,84	10.204,20	0,30	0,72	2,05	1,13
5	Tanah Datar	69,42	13,92	8,35	10.468,20	0,34	1,43	1,67	0,95
6	Padang Pariaman	68,27	13,59	7,49	10.821,80	0,34	0,19	2,71	1,41
7	Agam	71,88	13,85	8,61	9.483,80	0,30	0,41	1,87	1,74
8	Lima Puluh Kota	69,51	13,27	7,96	9.4050	0,16	0,83	0,20	1,83
9	Pasaman	66,87	12,76	7,78	8.164,40	0,34	0,16	1,19	2,83
10	Solok Selatan	67,26	12,66	8,12	10.144,40	0,35	0,55	0,74	1,37
11	Dharmasraya	70,78	12,41	8,33	11.105,00	0,33	0,11	1,08	1,04
12	Pasaman Barat	67,42	13,19	7,96	8.860,60	0,23	2,05	0,91	2,23
	Kota								
1	Padang	73,39	16,31	11,36	14.239,80	0,13	1,16	1,09	1,39
2	Kota Solok	73,19	14,30	10,96	11.922,80	0,24	0,07	0,48	1,33
3	Sawahlunto	69,64	13,13	9,99	9.715,80	0,21	0,75	1,04	2,68
4	Padang Panjang	72,62	15,04	11,47	10.446,20	0,10	0,07	0,94	2,15
5	Bukittinggi	73,96	14,95	11,25	13.038,80	0,23	0,07	0,99	1,52
6	Payakumbuh	73,37	14,24	10,53	13.084,40	0,22	0,07	0,85	1,03
7	Pariaman	69,92	14,52	10,30	12.586,20	0,20	0,07	1,24	1,62
	SUMATERA BARAT (Provinsi)	69,06	13,94	8,80	10.545,60	0,23	0,61	1,32	1,84

Sumber: BPS, 2016 – 2017

Sementara itu, rata-rata pengeluaran perkapita perbulan penduduk Kota Solok masih berada dibawah kota Padang, Payakumbuh, Bukittinggi, dan Pariaman. Sebaliknya, seiring dengan relatif rendahnya laju pertumbuhan IPM, laju pertumbuhan indikator penyusun IPM Kota Solok juga tumbuh cukup lambat. Dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat, laju pertumbuhan indikator IPM Kota Solok menempati urutan ke-10, 17, 18, dan 16 untuk indikator angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pendapatan perkapita masing-masingnya. Bahkan capaian tiga indikator yang disebutkan terakhir jauh dibawah capaian provinsi Sumatera Barat.

#### **4.6.3. Indikator penyusun IPM**

Selain melihat tren dan perbandingan dengan daerah lain, perkembangan IPM juga bisa dianalisis melalui indikator penyusun IPM yaitu angka harapan lama hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pendapatan perkapita perbulan. Angka harapan hidup merupakan indikator IPM yang menjelaskan pembangunan manusia dari dimensi Kesehatan. Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah menjelaskan pembangunan manusia dari dimensi Pendidikan. Sementara itu pengeluaran perkapita menjelaskan pembangunan manusia dari dimensi ekonomi. Bagian ini akan menganalisis indikator penyusun IPM dan beberapa faktor yang mempengaruhinya secara detail.

##### **a. Dimensi Kesehatan**

BPS mendefinisikan AHH sebagai rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur tertentu, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya (BPS, 2015). Sehubungan

dengan itu, maka AHH bisa digunakan untuk menilai kinerja pemerintah dibidang kesehatan dalam rangka meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

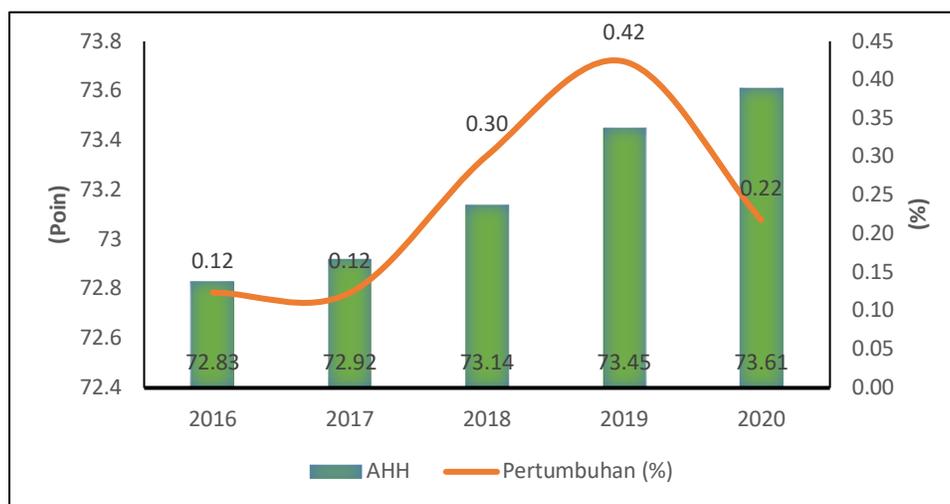
Umur harapan hidup Kota Solok meningkat setiap tahunnya selama periode 2016 – 2020. Pada tahun 2020 umur harapan hidup di Kota Solok mencapai 73.61. Hal ini berarti secara rata-rata bayi yang lahir pada tahun 2020 mampu bertahan hidup sampai umur 73.61 tahun. Walaupun capaian ini berada pada posisi keempat dan diatas capaian provinsi Sumatera Barat, namun demikian laju pertumbuhan umur harapan hidup masih terlihat berfluktuasi dan cenderung turun di tahun 2020. Kondisi ini menyiratkan bahwa program-program pembangunan Kesehatan di Kota Solok perlu dioptimalkan lagi agar peningkatan derajat Kesehatan masyarakat dapat tercapai dengan maksimal.

Umur harapan hidup yang merepresentasikan derajat kesehatan masyarakat sangat terkait dengan kondisi morbiditas (angka kesekitan) yang dialami penduduk. Kemudian, morbiditas penduduk ditentukan oleh kondisi lingkungan, perilaku, pelayanan Kesehatan, dan keturunan. Namun demikian, faktor yang berpengaruh besar terhadap morbiditas adalah lingkungan (45 persen), perilaku (30 persen), dan pelayanan kesehatan (20 persen), sementara itu pengaruh keturunan terhadap morbiditas hanya 5 persen saja (BPS, 2020). Artinya, ketika faktor yang berkontribusi besar tersebut dapat dikontrol dengan baik, maka diharapkan morbiditas masyarakat bisa dikendalikan dengan baik yang berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Sebagai salah satu penentu derajat Kesehatan masyarakat, faktor lingkungan sudah menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini terlihat dari baiknya capaian Kota Solok untuk beberapa indikator seperti tempat buang air besar, sanitasi, sumber air minum yang

layak, dan jenis lantai terluas. Namun demikian, perilaku masyarakat masih harus menjadi perhatian, pasalnya walaupun persentase penduduk 15 tahun keatas yang merokok menunjukkan tren yang menurun, namun rata-rata jumlah batang rokok yang dihisap justru mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dibidang pelayanan kesehatan, ternyata persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap mengalami penurunan yang cukup tajam pada tahun 2020. Kemungkinan kondisi ini hanya bersifat sementara akibat pandemi covid-19. Selain itu, persentase penduduk berobat jalan yang sedang mengalami keluhan Kesehatan juga terlihat menurun. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti tidak ada biaya, tidak punya waktu, tidak ada biaya transportasi, dan merasa tidak perlu. Kondisi ini perlu mendapat perhatian agar semua masyarakat yang mengalami keluhan Kesehatan bisa ditangani dengan baik.

Gambar 4.14.  
Perkembangan AHH Kota Solok, 2016 - 2020



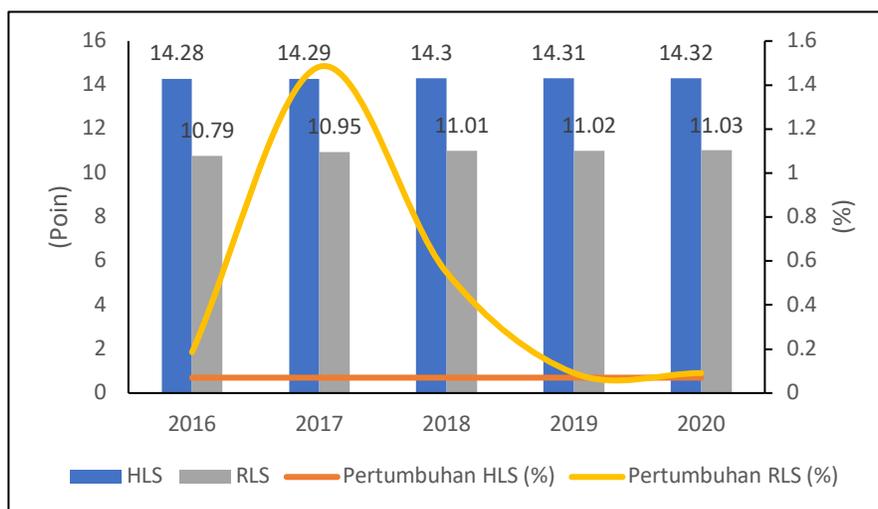
Sumber: BPS, 2016 – 2017

## b. Dimensi Pendidikan

Harapan lama Sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) merupakan dua indikator penyusun IPM dari dimensi Pendidikan. Angka HLS menginformasikan kemungkinan anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Sementara itu RLS menunjukkan seberapa tinggi tingkat Pendidikan masyarakat di suatu wilayah.

Angka HLS kota Solok menunjukkan tren yang positif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 HLS kota Solok mencapai 14,32 yang berarti bahwa secara rata-rata anak umur tujuh tahun yang memasuki jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 berkemungkinan untuk bersekolah selama 14,32 tahun atau setara dengan Diploma II. Secara sama, RLS Kota Solok juga terus meningkat selama lima tahun terakhir.

Gambar 4.15.  
Perkembangan HLS dan RLS Kota Solok, 2016 - 2020



Sumber: BPS, 2016 – 2017

Angka RLS Kota Solok pada tahun 2020 sebesar 11,03 menunjukkan bahwa secara rata-rata penduduk yang berumur 15 tahun ke atas telah mampu bersekolah hingga kelas dua SMA. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa Kota Solok telah jauh melampaui program wajib belajar sembilan tahun dan hampir berhasil mencapai program wajib belajar 12 tahun. Namun demikian, permasalahan yang perlu diperhatikan pada indikator HLS dan RLS adalah stagnasi dan perlambatan laju pertumbuhan. Selama lima tahun terakhir, laju pertumbuhan HLS kota Solok cenderung stagnan pada tingkat 0.07 persen. Bahkan laju pertumbuhan RLS cenderung melambat pada periode yang sama. Selama tahun 2019 dan 2020 RLS hanya tumbuh sebesar 0,09 persen.

Tinggi atau rendahnya capaian pembangunan manusia pada dimensi Pendidikan sangat tergantung pada akses masyarakat terhadap Pendidikan. Akses masyarakat terhadap Pendidikan tergantung pula sedikitnya pada dua hal yaitu kemampuan masyarakat untuk mengakses Pendidikan tersebut dan ketersediaan Pendidikan yang akan diakses oleh masyarakat. Oleh sebab itu, dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan HLS dan RLS melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan diperlukan pemerataan Pendidikan baik dalam bentuk akses maupun kualitas pendidikan itu sendiri. Pemerataan dalam bentuk akses dapat dilakukan dengan optimalisasi Program Indonesia Pintar (PIP). Optimalisasi ini sangat diperlukan agar distribusi tepat sasaran dan pencairan dana bagi penerima manfaat dapat dilakukan secara tepat waktu. Sementara itu, peningkatan akses masyarakat melalui ketersediaan Pendidikan dapat dilakukan dengan memperkuat infrastruktur dan fasilitas Pendidikan seperti penambahan ruang kelas baru, program revitalisasi sekolah, revitalisasi laboratorium, dan peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru. Hal ini terutama sekali

---

sangat penting bagi sekolah sekolah yang menciptakan lulusan yang langsung memasuki dunia kerja seperti lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

**c. Dimensi Ekonomi**

Dimensi ekonomi dari pembangunan manusia diukur berdasarkan pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Pengeluaran perkapita Kota Solok tumbuh cukup baik selama periode 2016 – 2019 namun menurun sedikit pada tahun 2020 akibat pandemi covid-19. Walaupun sedikit berfluktuasi, pertumbuhan pengeluaran perkapita Kota Solok menunjukkan kecenderungan yang positif. Pada tahun 2016 pengeluaran perkapita tumbuh sebesar 1,49 persen dan menjadi 3,08 persen pada tahun 2019. Akibat pandemi covid-19 pengeluaran perkapita mengalami kontraksi sebesar 1,78 persen pada tahun 2020.

Tantangan dalam meningkatkan pembangunan manusia pada dimensi ekonomi adalah kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, kondisi kemiskinan Kota Solok menunjukkan kinerja yang sangat baik dimana jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin terus berkurang setiap tahunnya. Selanjutnya, ketimpangan pendapatan di Kota Solok juga memperlihatkan kecenderungan yang menurun. Namun demikian, tingkat pengangguran Kota Solok justru menunjukkan tren yang meningkat. Kondisi ini menyiratkan bahwa penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin lebih disebabkan oleh berhasilnya program pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin baik dalam bentuk uang tunai (Unconditional Cash Transfer) maupun dalam program yang melekat pada Pendidikan, Kesehatan, dan penyediaan pangan (Conditional Cash Transfer).

Artinya, penurunan kemiskinan belum disebabkan oleh naiknya pendapatan masyarakat yang diperoleh dari bekerja.

Gambar 4.16.  
Perkembangan Pengeluaran Perkapita Kota Solok, 2016 - 2020



Sumber: BPS, 2016 – 2017

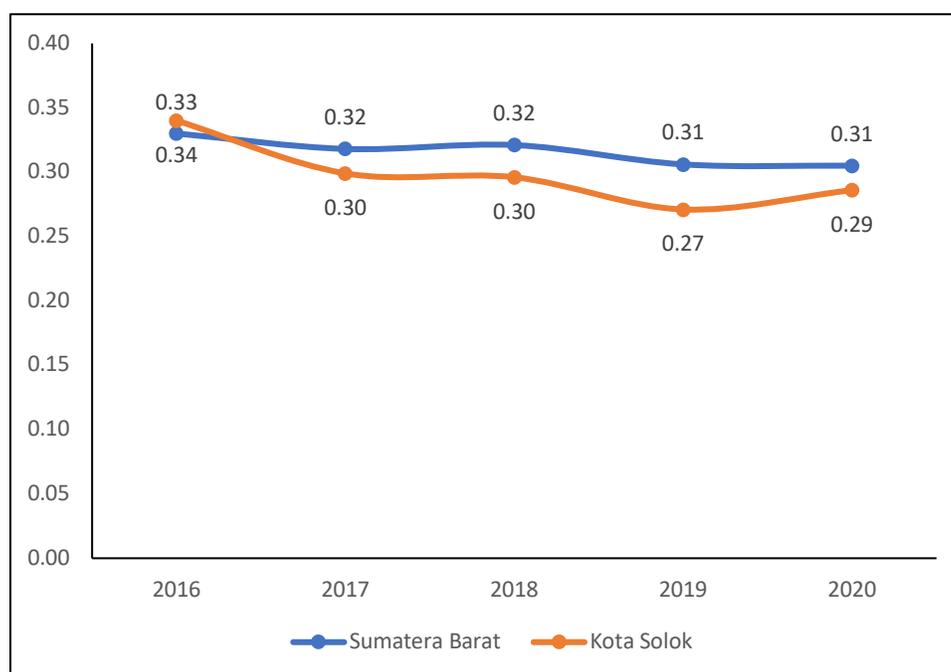
#### 4.7. Pemerataan Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi berkelanjutan salah satunya tercermin dari peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah melalui peningkatan pendapatan yang disertai dengan penurunan kesenjangan (ketimpangan). Oleh sebab itu, ketimpangan merupakan salah satu yang sangat menentukan keberhasilan suatu negara atau daerah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ketimpangan pendapatan dapat diukur dengan menggunakan gini rasio. Semakin tinggi nilai gini, maka semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan di suatu

wilayah. Sebaliknya, nilai gini yang rendah mencerminkan baiknya pemerataan pendapatan.

Pemerataan pembangunan di Kota Solok dapat dilihat dari perkembangan gini rasio. Gini rasio Kota Solok terus menurun selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 gini rasio Kota Solok sebesar 0,34 kemudian turun menjadi 0,29 pada tahun 2020. Penurunan gini rasio Kota Solok mengindikasikan bahwa terjadi pemerataan pendapatan masyarakat di Kota Solok selama tahun 2016 – 2017. Rasio gini Kota Solok berada dibawah rasio gini Provinsi Sumatera Barat.

Gambar 4.17.  
Perbandingan Gini Rasio Kota Solok dan Sumatera Barat, 2016 - 2020



Sumber: BPS, 2016 – 2017

#### 4.8. Kemampuan Keuangan Daerah

Pemberlakuan UU No. 22 Tahun 1999 berubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 berubah menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang keuangan daerah merupakan sebagai fondasi dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia pada saat ini. Kemampuan pengelolaan keuangan daerah tergambar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan informasi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Komponen utama dalam pembiayaan program dan kegiatan pembangunan daerah bersumber pada penerimaan daerah yang dapat berupa pajak, retribusi, dan dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan ini maka terdapat empat elemen penting yang diserahkan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, diantaranya desentralisasi politik, derajat desentralisasi, desentralisasi, administrasi, dan desentralisasi ekonomi. Dari keempat elemen, derajat desentralisasi merupakan elemen yang terpenting. Derajat desentralisasi tercermin dalam pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien. Derajat desentralisasi akan menggambarkan kemandirian/kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerah.

Dalam pengelolaan keuangan, penganggaran selalu menemui kendala. Kendala penganggaran tercermin dari ketidakseimbangan antara kebutuhan anggaran untuk pembiayaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan keterbatasan ketersediaan sumber-sumber pendapatan daerah. Kondisi ini menghendaki dilakukan prioritas belanja dan perencanaan terhadap program dan kegiatan pembangunan. Dalam menganalisis kemampuan keuangan APBD Kota Solok maka yang menjadi perhatian adalah ketersediaan informasi kualitas

---

dan kemampuan keuangan APBD dari sisi penerimaan, belanja daerah, dan kemampuan keuangan daerah yang dilihat dari derajat desentralisasi, kemandirian/ketergantungan keuangan daerah.

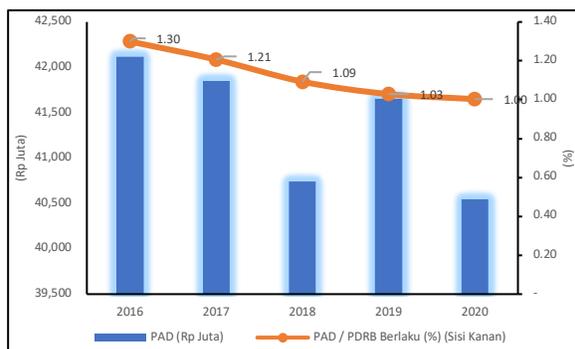
#### **4.8.1. Penerimaan Daerah**

Dari sisi penerimaan, analisis keuangan APBD Kota Solok memperhatikan beberapa hal, yaitu: perkembangan pendapatan asli daerah (PAD) dan rasionya terhadap PDRB, perkembangan dana perimbangan dan rasionya terhadap PDRB, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah dan rasionya terhadap PDRB. Analisis sisi penerimaan pada APBD dapat memberikan informasi kualitas dan kemampuan keuangan daerah Kota Solok. PAD Kota Solok selama periode 2016-2020 mengalami fluktuasi, tetapi rasionya terhadap PDRB mengalami penurunan dari tahun ke tahun selama periode 2016-2020. Pada tahun 2020, PAD Kota Solok mencapai Rp. 40,55 miliar dengan rasio terhadap PDRB sebesar 1%. Capaian PAD pada tahun 2020 menurun dari tahun tahun sebelumnya dimana pada tahun 2016 telah mencapai Rp. 42,11 miliar dengan rasionya terhadap PDRB mencapai 1,30%. Kondisi ini disebabkan terjadinya penurunan yang drastis pada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang merupakan komponen utama dalam PAD Kota Solok. Pada tahun 2016, komponen lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 19,24 miliar menurun menjadi sebesar Rp. 9,94 miliar pada tahun 2020.

Selanjutnya, dana perimbangan Kota Solok selama periode 2016-2020 mengalami fluktuasi dengan rasionya terhadap PDRB mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, Dana perimbangan Kota Solok sebesar Rp. 440,02 miliar dengan rasio terhadap PDRB sebesar 10,89%. Penerimaan dana perimbangan pada tahun 2020 menurun dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2016 dana perimbangan diperoleh Rp. 508,17 miliar dengan rasionya terhadap PDRB mencapai 15,68%. Penurunan penerimaan dana perimbangan disebabkan oleh penurunan penerimaan pada ketiga komponen dana perimbangan seperti dana

bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK). Penurunan drastis terlihat pada dana alokasi umum dimana pada tahun 2016 sebesar Rp. 405,23 miliar menjadi Rp. 376,13 miliar pada tahun 2020. COVID-19 telah mengubah dana alokasi umum terdiri dari alokasi dasar (AD) dan celah fiskal (CF).

Gambar 4.18.  
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (Rp Juta) dan Rasionya Terhadap PDRB (%) Kota Solok, 2016-2020



Sumber: Diolah dari DJPK, 2016-2020

Gambar 4.19.  
Perkembangan Dana Perimbangan (Rp Juta) dan Rasionya Terhadap PDRB (%) Kota Solok, 2016-2020



Sumber: Diolah dari DJPK, 2016-2020

Gambar 4.20.  
Perkembangan Lain-lain Pendapatan yang Sah (Rp Juta) dan Rasionya Terhadap PDRB (%) Kota Solok, 2016-2020



Sumber: Diolah dari DJPK, 2016-2020

Komponen pendapatan daerah Kota Solok berikutnya adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Perkembangan lain-lain pendapatan daerah yang sah dari Kota Solok selama periode 2016-2020 mengalami peningkatan bersamaan dengan rasionya terhadap PDRB. Pada tahun

2020, lain-lain pendapatan daerah yang sah dari Kota Solok telah mencapai Rp. 64,97 miliar dengan rasio terhadap PDRB sebesar 1,61%. Penerimaan lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2020 meningkat tahun sebelumnya dimana pada tahun 2016 lain-lain pendapatan daerah yang sah diperoleh Rp. 23,26 miliar dengan rasionya terhadap PDRB mencapai 0,72%. Peningkatan lain-lain pendapatan daerah yang sah disebabkan oleh peningkatan penerimaan dana hibah dan bagi hasil provinsi atau Pemda lain dimana dana hibah meningkat dari Rp. 1,54 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp. 11,51 miliar pada tahun 2020. Sementara itu, bagi hasil provinsi atau Pemda lain meningkat dari Rp. 20,61 miliar menjadi Rp. 22,99 miliar pada tahun 2020.

#### **4.8.2. Pengeluaran Daerah**

Dari sisi pengeluaran, analisis keuangan daerah Kota Solok memperhatikan perkembangan belanja daerah dan rasionya terhadap PDRB, rasio belanja langsung terhadap belanja tak langsung, dan rasio belanja pegawai terhadap total belanja, rasio belanja pegawai terhadap total belanja. Analisis rasio pengeluaran daerah ini memberikan gambaran pola belanja daerah dan dapat memberikan petunjuk bagaimana kecenderungan suatu daerah dalam mengalokasikan belanjanya apakah untuk pembangunan sektor riil atau terkait dengan pendanaan aparatur daerah, seperti belanja pegawai.

Selama periode 2016-2020, kecenderungan total belanja daerah Kota Solok berfluktuatif. Total belanja daerah Kota Solok pada tahun 2020 sebesar Rp. 497,45 miliar dengan rasionya terhadap PDRB mencapai 12,31%. Belanja daerah Kota Solok pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2016 belanja daerah tercatat sebesar Rp. 548,99 miliar dengan rasio terhadap PDRB sebesar 16,94%. Rasio rata-rata total belanja terhadap PDRB Kota Solok selama periode 2016-2020 sebesar 15,56% per tahun.

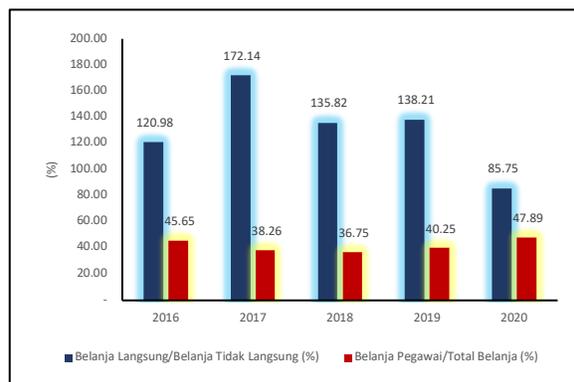
Ini mengindikasikan bahwa belanja daerah Kota Solok memiliki peran yang cukup besar dalam mendorong peningkatan output Kota Solok selama periode 2016-2020.

Gambar 4.21.  
Perkembangan Belanja Daerah (Rp Juta) dan Rasionya Terhadap PDRB (%) Kota Solok, 2016-2020



Sumber: Diolah dari DJPK, 2016-2020

Gambar 4.22.  
Rasio Belanja Langsung terhadap Belanja Tidak Langsung dan Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja (%), 2016-2020



Sumber: Diolah dari DJPK, 2016-2020

Selain menganalisis rasio belanja daerah terhadap PDRB, penelusuran rasio belanja langsung dengan belanja tidak langsung penting pula dilakukan. Analisis rasio belanja langsung dengan belanja tidak langsung memberikan indikasi arah pembiayaan pembangunan Kota Solok. Hasil analisis memperlihatkan rasio belanja langsung dengan belanja tidak langsung Kota Solok berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan selama periode 2016-2020. Rata-rata rasio belanja langsung terhadap belanja tidak langsung selama periode 2016-2020 sebesar 130,58% per tahun. Pada tahun 2020 rasio belanja langsung terhadap belanja tidak langsung sebesar 85,75% menurun dari tahun 2016 sebesar 120,98%. Penurunan rasio belanja langsung terhadap belanja tidak langsung mengindikasikan semakin sulit bagi Kota Solok untuk mencapai pemerataan pembangunan. Akselerasi pembangunan daerah dan pemerataan ekonomi dapat dilakukan ketika rasio belanja langsung lebih besar dari biaya tidak langsung. Progresif pembangunan dan pemerataan ekonomi dapat terjadi jika pemerintah daerah Kota Solok berkomitmen meningkatkan rasio belanja langsung terhadap belanja tidak langsung. Peningkatan belanja langsung ditandai dengan peningkatan belanja barang dan jasa serta belanja modal

terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Jika belanja barang dan jasa serta belanja modal secara konsisten dapat ditingkatkan maka percepatan dan pemerataan pembangunan Kota Solok dapat terwujud dengan cepat.

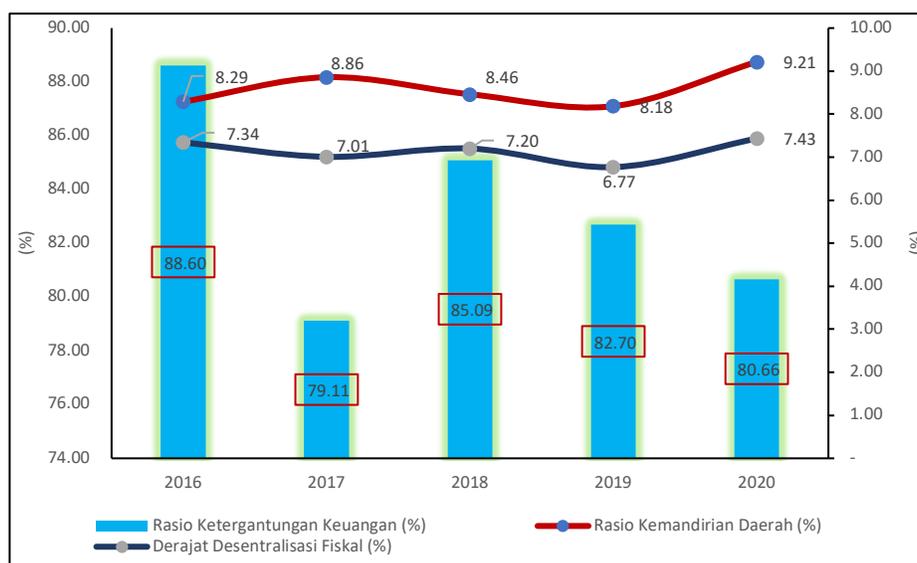
Selanjutnya, analisis belanja daerah dapat pula dilakukan dengan melihat perkembangan belanja pegawai dan rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Selama periode 2016-2020, belanja pegawai mengalami penurunan dari Rp. 250,63 miliar pada tahun 2016 menjadi Rp. 238,24 pada tahun 2020. Walaupun mengalami penurunan, belanja pegawai masih mendominasi total belanja daerah Kota Solok yang terlihat dari rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah Kota Solok berfluktuatif dengan rasio rata-rata sebesar 41,76% per tahun selama periode 2016-2020. Pada tahun 2016 rasio belanja pegawai terhadap total belanja sebesar 45,65% meningkat menjadi sebesar 47,89% pada tahun 2020. Masih relatif tinggi rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah Kota Solok berdampak pada keterbatasan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah Kota Solok menghadapi kendala dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berupa peningkatan pembangunan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

#### **4.8.3. Kemampuan Keuangan Daerah**

Ada 3 (tiga) perhitungan yang sering digunakan dalam melihat dan menganalisis kemampuan keuangan daerah Kota Solok, yakni rasio ketergantungan keuangan daerah (KKD), rasio derajat desentralisasi (RDD), dan rasio kemandirian daerah (RKD). Rasio derajat desentralisasi (RDD) dihitung dari rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah (TPD). Rasio ketergantungan keuangan daerah (KKD) dihitung dari rasio pendapatan transfer (PT) terhadap total pendapatan daerah (TPD). Sedangkan rasio kemandirian daerah (RKD) dihitung dari rasio pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan transfer (PT).

Hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi selama periode 2016-2020 menunjukkan derajat desentralisasi Kota Solok berfluktuatif. Derajat desentralisasi Kota Solok berkisar antara 6,77% hingga 7,43% dan cenderung meningkat pada tahun 2020. Pada tahun 2016 derajat desentralisasi fiskal Kota Solok sebesar 7,34% meningkat menjadi 7,43% pada tahun 2020. Hasil perhitungan derajat desentralisasi fiskal yang kurang dari 10% mengindikasikan bahwa derajat kewenangan dan tanggung jawab yang dipikulkan oleh pemerintah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kota Solok masih sangat rendah. Untuk mempercepat pembangunan Kota Solok maka peningkatan derajat desentralisasi fiskal penting dilakukan dengan optimalisasi berbagai potensi-potensi pajak dan retribusi daerah Kota Solok.

Gambar 4.23.  
Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian, dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Solok (%), 2016-2020



Sumber: Diolah dari DJPK, 2016-2020

Selanjutnya, hasil perhitungan ketergantungan keuangan daerah juga menunjukkan fluktuasi selama periode 2016-2020. Kemampuan keuangan daerah Kota Solok berkisar antara 79,11% hingga 88,60% dan cenderung menurun pada tahun 2020. Pada tahun 2016 derajat ketergantungan keuangan daerah Kota Solok sebesar 88,60% menurun menjadi 80,60% pada

tahun 2020. Hasil perhitungan ketergantungan keuangan daerah Kota Solok diatas dari 80% menunjukkan ketergantungan keuangan daerah Kota Solok pada pemerintah pusat masih sangat tinggi. Kondisi ini dapat pula diinterpretasikan bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah Kota Solok dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat masih sangat rendah.

Sebaliknya, hasil perhitungan kemandirian keuangan daerah memperlihatkan fluktuasi selama periode 2016-2020. Kemandirian keuangan daerah Kota Solok berkisar antara 8,18% hingga 9,21% dan cenderung meningkat pada tahun 2020. Pada tahun 2016 derajat kemandirian keuangan daerah Kota Solok sebesar 8,29% meningkat menjadi 9,21% pada tahun 2020. Hasil perhitungan derajat kemandirian keuangan daerah Kota Solok yang kurang dari 10% menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah Kota Solok dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat masih sangat kurang. Hasil perhitungan kemandirian keuangan daerah Kota Solok ini sejalan dengan hasil perhitungan ketergantungan keuangan daerah.

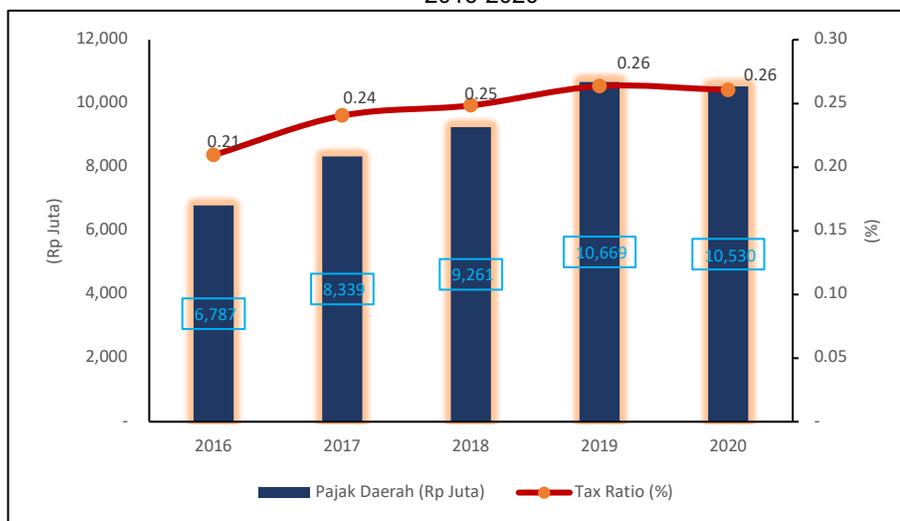
Hasil perhitungan derajat desentralisasi fiskal yang sangat rendah, ketergantungan keuangan daerah yang sangat tinggi, dan kemandirian keuangan daerah yang sangat rendah mengimplikasikan kemampuan keuangan daerah Kota Solok yang sangat kurang. Kondisi ini menunjukkan tingkat ketergantungan yang besar dari Kota Solok pada pemerintah pusat dan provinsi dalam membiayai sendiri pengeluaran langsung kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Walaupun demikian, hasil perhitungan rasio kemandirian Kota Solok dari waktu ke waktu menunjukkan angka yang semakin membesar dan rasio ketergantungan daerah memberikan nagka yang semakin mengecil. Kondisi ini mengindikasikan pemerintah Kota Solok secara berangsur-angsur semakin mampu dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Hasil perhitungan ini merekomendasikan pentingnya upaya pemerintah daerah Kota Solok meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui berbagai

upaya ekstensifikasi dan intensifikasi keuangan daerah. Optimalisasi peluang-peluang sumber penerimaan daerah melalui ekstensifikasi keuangan daerah, sedangkan perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan melalui intensifikasi keuangan daerah.

#### 4.9. Tax Ratio

*Tax ratio* mengukur perbandingan penerimaan pajak dengan PDRB. Hasil pengukuran *tax ratio* menyiratkan besaran porsi pajak dalam perekonomian daerah. Semakin besar porsi pajak terhadap PDRB menunjukkan semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak yang makin besar memungkinkan daerah membiayai program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah.

Gambar 4.24.  
Perkembangan Pajak Daerah (Rp Juta) dan Rasionya Terhadap PDRB (%) Kota Solok, 2016-2020



Sumber: Diolah dari DJPK, 2016-2020

Selama periode 2016-2020, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Solok mengalami fluktuasi. Fluktuasi PAD Kota Solok tidak terlepas dari komponen PAD seperti lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah retribusi mengalami penurunan, sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pajak daerah mengalami peningkatan. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 22,07% per tahun. Peningkatan pajak daerah bersamaan dengan peningkatan kontribusinya terhadap PDRB. Pada tahun 2016, pajak daerah Kota Solok mencapai Rp. 6,79 miliar dengan rasionya terhadap PDRB sebesar 0,21%.

Tabel 4.10.  
Perkembangan *Tax Ratio* Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (%), 2016-2020

No	Daerah	2016	2017	2018	2019	2020
Kabupaten						
1	Kepulauan Mentawai	0,07	0,07	0,11	0,11	0,08
2	Pesisir Selatan	0,12	0,15	0,18	0,17	0,15
3	Kab.Solok	0,10	0,12	0,15	0,15	0,14
4	Sijunjung	0,15	0,17	0,17	0,16	0,14
5	Tanah Datar	0,11	0,14	0,16	0,15	0,14
6	Padang Pariaman	0,15	0,19	0,20	0,23	0,23
7	Agam	0,13	0,15	0,16	0,15	0,14
8	Lima Puluh Kota	0,11	0,13	0,14	0,15	0,15
9	Pasaman	0,12	0,11	0,12	0,12	0,11
10	Solok Selatan	0,11	0,14	0,15	0,15	0,12
11	Dharmasraya	0,14	0,16	0,30	0,19	0,17
12	Pasaman Barat	0,11	0,13	0,14	0,14	0,12
Kota						
1	Padang	0,52	0,62	0,61	0,62	0,55
2	Solok	0,21	0,24	0,25	0,26	0,26
3	Sawahlunto	0,16	0,17	0,16	0,15	0,15
4	Padang Panjang	0,22	0,23	0,26	0,26	0,23
5	Bukittinggi	0,45	0,51	0,56	0,52	0,42
6	Payakumbuh	0,21	0,25	0,26	0,26	0,25
7	Pariaman	0,16	0,19	0,22	0,20	0,20
Sumatera Barat		0,78	0,76	0,78	0,76	0,75

Sumber: Diolah dari data DJPK, 2016-2020

Sementara itu, pada tahun 2020, pajak daerah Kota Solok meningkat dengan capaian sebesar Rp. 10,53 miliar dimana besaran rasionya terhadap PDRB sebesar 0,26%. Besaran rasio pajak daerah Kota Solok terhadap PDRB pada tahun 2020 merupakan yang besaran rasio tertinggi selama periode 2016-2020. Pencapaian rasio pajak daerah terhadap PDRB Kota Solok sebesar 0,26% termasuk dalam kelompok *tax ratio* daerah tiga tertinggi di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Penerimaan pajak pada tahun dilanda Covid-19 masih bisa mencapai Rp. 10,53 miliar pada tahun 2020 yang turun sedikit

dari penerimaan sebelum Covid-19 sebesar Rp.10,67 miliar pada tahun 2019.

Walaupun termasuk ke dalam kelompok daerah yang memiliki *tax ratio* tertinggi antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, capaian *tax ratio* ini masih tergolong rendah dibandingkan capaian *tax ratio* Provinsi Sumatera Barat dengan rata-rata sebesar 0,77% per tahun selama periode 2016-2020. Capaian rasio pajak yang relatif rendah mengindikasikan masih rendahnya kemampuan pemerintah Kota Solok dalam membiayai pengeluaran pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Kota Solok. Menurut standar internasional, rasio pajak yang ideal adalah sebesar 15% keatas. Rata-rata rasio pajak Kota Solok sebesar 0,24% per tahun selama periode 2016-2020 mencerminkan masih relatif rendahnya potensi penerimaan pajak daerah dan kurang beragamnya jenis pajak daerah. Potensi penerimaan pajak Kota Solok hanya mungkin ditingkatkan dengan makin berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat dan dunia usaha. Ekstensifikasi dan intensifikasi potensi penerimaan pajak hanya mungkin dilakukan ketika kondisi perekonomian daerah Kota Solok yang makin maju dan berkembang. Kondisi *new normal* Covid-19 semakin menambah tantangan bagi pemerintah daerah Kota Solok dalam memajukan perekonomian daerah.

#### **4.10. Indeks Daya Saing Daerah**

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan salah satu komponen penting di dalam penguatan ekonomi domestik. Peningkatan perekonomian domestik, baik oleh daerah dan nasional akan menjadi modal utama untuk menjaga momentum pembangunan dan melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi untuk menuju ke arah transformasi ekonomi menjadi negara maju dan berdaya saing. Oleh sebab itu, peran daerah untuk meningkatkan daya saing daerahnya akan sangat bergantung kepada kemampuan daerah untuk melakukan identifikasi faktor penentu daya saing dan strategi untuk meningkatkan daya saingnya.

Dilihat dari data IDSD yang dipublikasikan oleh BRIN (Badan Riset dan Inovasi nasional) sejak tahun 2017, ternyata kota Solok baru memiliki data pada tahun 2019 dan 2020, adapun skala nilai IDSD dan kategori untuk tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel 4.11.

Tabel 4.11  
Nilai dan Kategori IDSD Tahun 2019 dan 2020

2019		2020	
Nilai IDSD	Kategori	Nilai IDSD	Kategori
0-3	Rendah	0-1,25	Rendah
3,01-6	Sedang	1,26-2,50	Sedang
6,01-8	Tinggi	2,51-3,75	Tinggi
8,01-12	Sangat Tinggi	3,76-5,00	Sangat Tinggi

Sumber: <https://indeks.inovasi.ristekbrin.go.id>, 2020.

Pada tahun 2019, IDSD Kota Solok sudah masuk pada kategori tinggi dengan nilai 6,2145, dimana aspek yang memiliki nilai daya saing paling tinggi adalah aspek Sumber daya manusia sedangkan aspek dengan nilai terendah adalah aspek Faktor Pasar. Faktor pasar memiliki 4 (empat) pilar yakni Pilar Ketenagakerjaan, Pilar Akses Keuangan, Pilar Ukuran Pasar dan Pilar Dinamika Bisnis. Penguatan keempat pilar ini akan menentukan peningkatan nilai IDSD kota Solok.

Tabel 4.12  
Nilai Aspek dan IDSD Kota Solok Tahun 2019-2020

No	Aspek	Nilai	
		2019	2020
1	Faktor Penguat/Enabling Environment	1,1313	2,0318
2	Sumber Daya Manusia/Human Capital	2,4133	1,6667
3	Faktor Pasar/Market	0,9879	0,7292
4	Ekosistem Inovasi	1,6820	0,1296
	Nilai IDSD	6,2145	1,1393
	Kategori	Tinggi	Sedang

Sumber: <https://indeks.inovasi.ristekbrin.go.id>, 2020.

Pada tahun 2020, IDSD Kota Solok mengalami penurunan kategori dari tinggi menjadi sedang, hal ini tentunya perlu diperhatikan dengan seksama dalam pengisian kuisioner yang diberikan oleh pihak BRIN. Adapun aspek yang memberikan nilai tertinggi untuk IDSD kota Solok pada tahun 2020 adalah aspek Faktor penguat yang terdiri dari tiga pilar yakni Pilar Kelembagaan, Infrastruktur dan perekonomian daerah. Sedangkan aspek dengan nilai terendah adalah ekosistem inovasi yang terdiri dari dua pilar, yaitu kapasitas inovasi dan kesiapan teknologi.

Perubahan sistem penilaian yang diterapkan oleh BRIN menyebabkan kesulitan dalam menganalisis daya saing daerah secara konsisten. Akan tetapi secara kategori didapatkan gambaran bahwa kota Solok memiliki daya saing daerah yang masih harus terus dibenahi agar dapat meningkatkan daya saing perekonomian daerah. Adapun aspek yang harus diperhatikan terutama adalah aspek pasar dan inovasi. Kedua aspek ini menjadi titik lemah daya saing daerah untuk tahun 2019 dan 2020. Untuk itu, tentunya perlu upaya yang lebih hati-hati dalam mengisi kuisioner dan membenahan pembangunan sesuai aspek yang akan dinilai.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis indikator pembangunan ekonomi Kota Solok yang telah diuraikan diatas maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. PDRB Kota Solok baik secara total maupun perkapita merupakan nomor enam terbesar di antara kabupaten/kota dalam Provinsi Sumatera Barat.
2. Kontribusi terbesar PDRB Kota Solok berasal dari sektor perdagangan dan reparasi, transportasi dan Pergudangan, dan konstruksi.
3. Pertumbuhan ekonomi Kota Solok cenderung melambat bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.
4. Pertumbuhan ekonomi Kota Solok berada diatas pertumbuhan rata-rata provinsi tetapi berada di bawah Nasional.
5. Laju inflasi Kota Solok relatif rendah.
6. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kota Solok berfluktuasi dengan kecenderungan menunjukkan pola yang hampir sama antara laki-laki dan perempuan.
7. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Solok tahun 2016-2020 didominasi oleh tamatan diploma dan SLTA. Masih tingginya tingkat pengangguran disebabkan oleh masih tingginya keinginan pencari kerja untuk dapat bekerja di sektor formal.
8. Jumlah penduduk miskin di Kota Solok dari tahun ke tahun mengalami penurunan, namun masih disebabkan oleh keberhasilan program pemerintah dan belum tercermin dari peningkatan pendapatan masyarakat.

9. IPM Kota Solok mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tetapi masih berada dibawah IPM kota dan Provinsi Sumatera Barat. Dari kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, IPM Kota Solok berada urutan ke empat.
10. Rasio gini Kota Solok secara teoritis masih tergolong rendah dimana berada dibawah 0,4. Tingkat ketimpangan pendapatan di Kota Solok berada dibawah tingkat ketimpangan Provinsi Sumatera Barat dan nasional.
11. PAD Kota Solok mengalami penurunan dari tahun sebelumnya bersamaan dengan menurunnya rasionya terhadap PDRB.
12. Pencapaian rasio pajak daerah terhadap PDRB sebesar 0,26% ini masih tergolong rendah dibandingkan daerah lain yang ada di Sumatera Barat. Kecenderungan total belanja daerah Kota Solok berfluktuatif.
13. Relatif tinggi rasio belanja pegawai terhadap total belanja berakibat pada keterbatasan anggaran dalam membiayai program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Belanja pegawai dan rasio belanja pegawai terhadap total belanja berfluktuatif. Derajat desentralisasi Kota Solok berfluktuatif.

## **5.2. Rekomendasi**

1. Kota Solok perlu memberikan perhatian yang lebih besar untuk mengembangkan sektor perdagangan dan reparasi, transportasi dan pergudangan, konstruksi karena ketiga sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian Kota Solok.
2. Untuk mengatasi tren laju pertumbuhan ekonomi yang melambat dan memperkuat fondasi ekonomi Kota Solok maka perlu meningkatkan kreatifitas dan mendayagunakan potensi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis potensi riil Kota Solok dengan dukungan lembaga pembiayaan dan perbankan berbasis syariah.
3. Dalam usaha menurunkan pengangguran dan memperluas kesempatan kerja maka

perlu mempersiapkan sumberdaya manusia produktif penggerak ekonomi yang memiliki jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) melalui pengembangan sekolah kejuruan yang berkualitas dan pengembangan lembaga keterampilan yang siap pakai.

4. Terkait dengan lambatnya laju pertumbuhan IPM, maka diperlukan untuk menciptakan program dan kegiatan dalam rangka mempercepat laju pertumbuhan IPM.
5. Penguatan program penciptaan lapangan kerja dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran.
6. Optimalisasi balai Latihan kerja bagi lulusan SMA dan SMK yang akan memasuki dunia kerja.
7. Pengentasan kemiskinan dilakukan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang diiringi dengan pemberian bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu secara berkelanjutan.
8. Secara berangsur-angsur mengurangi ketergantungan fiskal yang tinggi pada pemerintah pusat melalui penggalan sumber-sumber potensi pendapatan daerah dan mengembangkannya sebagai sumber pendanaan bagi pembangunan daerah.

---

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Allen, P.D., dan Fildes, R. (2001). *Econometric Forecasting, Principles of Forecasting: A Handbook for Researchers and Practitioners*, J. Scott Armstrong (ed.): Norwell, MA: Kluwer Academic Publishers, 2001
- Bank Indonesia. 2021. Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Barat. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/default.aspx>
- BPS. 2016. Kota Solok Dalam Angka 2016.
- BPS. 2017. Kota Solok Dalam Angka 2017.
- BPS. 2018. Kota Solok Dalam Angka 2018.
- BPS. 2019. Kota Solok Dalam Angka 2019.
- BPS. 2021. Produk Domestik Regional Bruto Kota Solok Menurut lapangan Usaha 2016-2020
- BPS. 2021. Produk Domestik Regional Bruto Kota Solok Menurut Penggunaan 2016-2020
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP–AMP YKPN
- Hyndman, R., Anne B. Koehler, J. Keith Ord, Ralph D. Snyder. (2008). *Forecasting with exponential smoothing* Springer.
- Koehler, A.B., Hyndman, R., , J. Keith Ord, Ralph D. Snyder. (2002), *A State Space Framework For Automatic Forecasting Using Exponential Smoothing Methods*, *International Journal of Forecasting*, 18, 439–454
- Sarle, C. F. (1925), *A The forecasting of the price of hogs*, *American Economic Review*, 15, Number 3, Supplement Number 2, 1-22.
- Wie, Thee Kian. 1981, *Perekonomian di Negara Berkembang*, Jakarta : Pustaka Jaya.



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KOTA SOLOK**  
Jl. Kapten Marah Hamid No. 53, Laing  
Kota Solok  
Sumatera Barat, Indonesia  
Kode Pos: 27326